

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI  
KESEHATAN KEUANGAN UNIT SIMPAN PINJAM  
KOPERASI**

(Studi pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh

Nor Hidayah

NIM. 219057202020967

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRAS TABALONG  
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KESEHATAN

KEUANGAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

(Studi pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022)

A. Nama Mahasiswa : Nor Hidayah

N I M : 219057202020967

Program Studi : Administrasi Bisnis

B. Disetujui oleh

Ketua Komisi Penguji : Shinta Avriyanti, S.E., M.A.B  
(.....)  
NIK 005 057 058

Penguji I : Hj. Indriati Sumarni, S.E., M.M  
(.....)  
NIK 005 057 056

Penguji II : Ahmad Farhani, S.Kom., M.A.B  
(.....)  
NIK 005 057 061

C. Dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dalam mempertahankan ujian skripsi  
pada tingkat Strata Satu (S-1) pada tanggal 07 Agustus 2023

Tanjung, 12 Agustus 2023

Mengetahui:

Ketua STIA Tabalong,

Ketua Prodi,

Administrasi Bisnis

Drs. Ahmat Harahap, M.A.P.

NIK 005 057 003

(Shinta Avriyanti, S.E., M.A.B.)

NIK 005 057 058

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nor Hidayah

NIM : 219057202020967

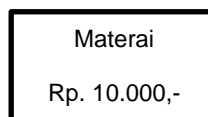
Jurusan : Administrasi Bisnis

Judul : Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kesehatan Keuangan  
Unit Simpan Pinjam Koperasi (Studi pada KPRI Warga  
Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya sepanjang sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, seta diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjung, 3 Agustus 2023



Nor Hidayah

NIM. 219057202020967

## **SURAT BEBAS PLAGIASI**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ahmad Harahap, M.A.P. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalong.
2. Ibu Shinta Avriyanti, S.E., M.A.B. selaku Ketua Prodi Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bisnis (STIA) Tabalong, sekaligus ketua komisi penguji dalam melaksanakan seminar dan sidang skripsi.
3. Ibu Hj. Indriati Sumarni, S.E., M.M selaku pembimbing dan penguji I dalam penyusunan skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan memberikan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Farhani, S.Kom., M.A.B selaku penguji II dalam melaksanakan seminar dan sidang skripsi.
5. Bapak dan Ibu seluruh dosen serta staf pelayanan STIA Tabalong yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada program studi Administrasi Bisnis.
6. Bapak Mujeriarudin, S.Pd., M.A.P. selaku Ketua KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong yang telah memberikan informasi untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Karyawan dan Pengurus KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong yang telah banyak memberikan informasi untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Sujud dan terimakasih yang dalam penulis persembahkan kepada ibunda dan ayahanda tercinta, atas dorongan yang kuat, bijaksana dan do'a yang dipanjatkan.

9. Suami tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan pada Program Studi Administrasi Bisnis yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasi dan waktu yang diberikan dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Tanjung, 10 Juli 2023

Penulis

Nor Hidayah

NIM. 219057202020967

## ABSTRAK

Nor Hidayah, NIM. 219057202020967, Program Sarjana Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, 2023. Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kesehatan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi (Studi Pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022). Dosen Pembimbing Hj. Indriati Sumarni, S.E., M.M.

KPRI Warga Depdikbud adalah salah satu koperasi di Kabupaten Tabalong yang sudah berdiri pada tahun 1988 dan memiliki anggota sebanyak 1.845 pertahun 2022 dengan total aset lebih dari 17M, diketahui koperasi ini belum melakukan penilaian kesehatan pada laporan keuangan tahun 2020-2022, penilaian kesehatan sangat penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan koperasi. Penilaian kesehatan keuangan koperasi didasari pada Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat kesehatan keuangan koperasi dan faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan koperasi yang dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi pada laporan keuangan tahun 2020-2022.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahap; 1) Dokumentasi; 2) Observasi; 3) Wawancara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Laporan keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong selama tahun 2020-2022 memperoleh predikat “Cukup Sehat” dengan skor 69,65 68,90 67,2 secara berurutan; (2) Faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dilihat dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, dan aspek kemandirian dan pertumbuhan.

**Kata kunci: Koperasi, Laporan Keuangan, Kesehatan Keuangan**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik tanpa ada kendala, Sholawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kesehatan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi (Studi pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022)”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Studi Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa selalu ada keterbatasan dalam penulisan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai masukan yang berkaitan dengan isi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis sebagai pihak yang meneliti tetapi juga bermanfaat bagi pihak lain yang membacanya.

Tanjung, 10 Juli 2023

Penulis

Nor Hidayah

NIM. 219057202020967



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	II
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	III
<b>SURAT BEBAS PLAGIASI</b> .....	IV
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	V
<b>ABSTRAK</b> .....	VII
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	VIII
<b>DAFTAR ISI</b> .....	IX
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	XII
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	XVI
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	XVII
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori .....	17
1. Koperasi .....	17
2. Unit Simpan Pinjam .....	21

3. Laporan Keuangan Koperasi .....	22
4. Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi.....	23
C. Kerangka Konseptual.....	40
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	42
1. Data Primer .....	42
2. Data Sekunder .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
1. Dokumentasi .....	43
2. Observasi .....	43
3. Wawancara .....	44
E. Analisis Data.....	44
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Data.....	49
1. Penyesuaian Data Penelitian.....	49
2. Sejarah Berdirinya KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong .....	49
3. Visi dan Misi KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong	50
B. Temuan Penelitian .....	50
1. Penilaian Aspek Permodalan.....	51
2. Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif.....	55
3. Penilaian Aspek Manajemen .....	61
4. Penilaian Aspek Efisiensi.....	64

5. Penilaian Aspek Likuiditas .....	68
6. Penilaian Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan .....	71
7. Penilaian Aspek Jatidiri Koperasi.....	75
C. Pembahasan.....	81
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1	Rekap Penilaian Kesehatan Koperasi Setia Budi Wanita Malang .....	15
2	Rekap Penilaian Kesehatan LKM Ngudi Lestari.....	16
3	Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset:.....	24
4	Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko.....	24
5	Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri .....	25
6	Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan .....	26
7	Standar Perhitungan Risiko Pinjaman Bermasalah .....	27
8	Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah.....	27
9	Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko.....	28
10	Standar Perhitungan Manajemen Umum .....	30
11	Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan.....	31
12	Standar Perhitungan Manajemen Permodalan.....	31
13	Standar Perhitungan Manajemen Aktiva .....	31
14	Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas .....	32
15	Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto .....	33
16	Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor.....	34
17	Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan .....	34
18	Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar .....	35

19	Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima .....	36
20	Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset.....	36
21	Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri .....	37
22	Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional .....	38
23	Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto: .....	39
24	Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota .....	39
25	Aspek Penilaian Kesehatan KSP/USP .....	45
26	Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP .....	48
27	Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset .....	52
28	Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset .....	52
29	Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko.....	53
30	Penskoran Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko .....	54
31	Hasil Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri .....	55
32	Penskoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri .....	55
33	Hasil Perhitungan Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Diberikan .....	56
34	Penskoran Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Diberikan .....	57
35	Hasil Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan.....	57
36	Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan.....	58

37	Hasil Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah.....	59
38	Penskoran Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah	59
39	Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Berisiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan.....	60
40	Penskoran Rasio Pinjaman Yang Berisiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan.....	60
41	Penskoran Manajemen Umum.....	62
42	Penskoran Manajemen Kelembagaan .....	62
43	Penskoran Manajemen Permodalan .....	63
44	Penskoran Manajemen Aktiva.....	63
45	Penskoran Manajemen Likuiditas .....	64
46	Hasil Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto .....	65
47	Penskoran Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto	66
48	Hasil Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor .....	66
49	Penskoran Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor .....	67
50	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	68
51	Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan.....	68
52	Hasil Perhitungan Rasio Kas .....	69
53	Penskoran Rasio Kas .....	69
54	Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima.....	70
55	Penskoran Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima.....	71

56	Hasil Perhitungan Rentabilitas Aset .....	72
57	Penskoran Rentabilitas Aset .....	72
58	Hasil Perhitungan Rentabilitas Modal Sendiri.....	73
59	Penskoran Rentabilitas Modal Sendiri.....	73
60	Hasil Perhitungan Kemandirian Operasional Pelayanan .....	74
61	Penskoran Kemandirian Operasional Pelayanan .....	75
62	Hasil Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto.....	76
63	Penskoran Rasio Partisipasi Bruto.....	76
64	Hasil Perhitungan Rasio Prmosi Ekonomi Anggota.....	77
65	Penskoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota.....	77
66	Rangkuman Skor Penilaian Kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022 .....	79

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Diagram Status Koperasi .....	3
2	Kerangka Konseptual.....	40
3	Skor 7 Aspek Penilaian Kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022 .....	80



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1	Data Informasi Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Tabalong.....	92
2	Data Jumlah Koperasi Primer Sekunder dan Anggotanya Sekalimantan Selatan.....	93
3	Persentasi Rasio Penilaian Kesehatan Keuangan KPRI Warga Depdikbud Tahun 2020-2022.....	95
4	Neraca KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022	96
5	Perhitungan Hasil Usaha KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022.....	98
6	Pembagian Sisa Hasil Usaha KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022 .....	100
7	Perhitungan Modal Sendiri Tertimbang & Perhitungan ATMR KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022 .....	101
8	Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong.....	104
9	Data Hasil Perhitungan Penilaian Kesehatan Keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022 .....	111

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi merupakan salah satu badan usaha penunjang ekonomi rakyat Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 yang berbunyi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB XIV Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dari penjelasan tersebut koperasi adalah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dalam pengoperasiannya dengan tujuan tidak mempersulit anggotanya sehingga tercapainya tujuan koperasi yang dapat mensejahterakan anggotanya.

Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya agar dapat bertahan dan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya maka diperlukan peningkatan dalam

internal dan eksternal koperasi untuk dapat terus bersaing, demi mencapai tujuan tersebut pengurus serta manajer dan karyawan memiliki peran yang penting dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan usaha harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar dalam pengambilan keputusan mendapat hasil yang terbaik untuk koperasi.

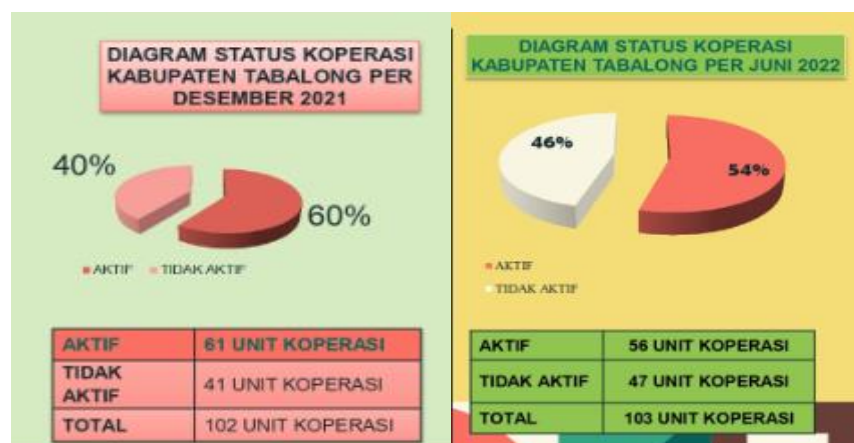
Jenis-jenis koperasi di Indonesia sangat beragam, salah satunya adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) WARGA DEPDIKBUD Kabupaten Tabalong yang beralamat di jalan Kamboja Rt. X No. 64 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, koperasi ini di khususkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sekarang jumlah anggotanya mencapai ribuan, sejak tahun 1988 KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong sudah aktif membantu perekonomian anggotanya hingga sekarang. KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong, merupakan badan usaha yang dimiliki oleh anggota untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi, yang dibentuk atas asas kekeluargaan dan tujuannya untuk mensejahterakan anggota, berdasarkan jenis usahanya koperasi ini bergerak di bidang simpan pinjam dan berdasarkan tingkatannya termasuk kedalam koperasi primer.

Koperasi ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya yang mana dalam melakukan pengajuan pinjaman jika di bandingkan dengan badan usaha lain terbilang sangat sederhana dan tidak rumit, dengan proses pencairan yang cepat, kemudahan itulah yang menjadi salah satu kelebihan koperasi, banyak anggota koperasi yang mengajukan kredit dengan nominal yang lumayan besar, dengan pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji oleh Dinas Pendidikan

bagian keuangan, untuk menilai kesehatan keuangan maka diperlukan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan di laporkan setiap tahun kepada anggota pada saat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dengan terus terjalannya rapat anggota maka dapat dikatakan koperasi tersebut termasuk kedalam kategori koperasi aktif.

Saat ini koperasi yang aktif di Tabalong masih sedikit, berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

**Gambar 1. 1 Diagram Status Koperasi**



**Sumber:** Diskopukmperindag Kab. Tabalong, 2023

Pada gambar 1.1 diagram status koperasi yang ada di Kabupaten Tabalong dilihat dari total unit koperasi mengalami kenaikan jumlah, pada tahun 2021 tercatat sejumlah 102 unit koperasi kemudian pada tahun 2022 tercatat sejumlah 103 unit koperasi, namun status koperasi aktif yang ada di Tabalong perbulan juni 2022 berjumlah total 56 unit koperasi angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan data pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif sebanyak 61 unit koperasi, jika di bandingkan jumlah

koperasi primer dengan kabupaten lain se-Kalimantan Selatan, Tabalong menduduki peringkat ke dua belas berdasarkan satuan data banua oleh Dinas Koperasi provinsi pada tahun 2021, dari tiga belas Kabupaten, Tabalong hanya unggul dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan data terlampir. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa koperasi yang ada di Tabalong masih kurang sehingga harus lebih ditingkatkan dan perlu perhatian lebih dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.

Jumlah koperasi di Tabalong masih rendah, ada berbagai kemungkinan yg mempengaruhi seperti kurangnya minat masyarakat untuk ikut berkoperasi dan kurangnya pengetahuan tentang perkoperasian, sumber daya manusia yang lemah menjadi salah satu faktor kemungkinan tertinggi yang menyebabkan kurangnya koperasi aktif yang ada di Tabalong karena penentuan aktif tidaknya koperasi dilihat dari pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama dua tahun berturut-turut, dengan tidak teraksananya rapat anggota tahunan maka berkaitan dengan laporan keuangan yang kemungkinan bermasalah.

Laporan keuangan suatu organisasi dapat dikatakan cukup baik dan akurat apabila laporan keuangan tersebut dapat diperbandingkan dalam beberapa periode tertentu, dengan perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran yang cukup dalam menilai kesehatan organisasi, laporan keuangan koperasi adalah laporan secara sistematis keadaan keuangan suatu koperasi dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan baik dipihak *intern* maupun *ekstern*. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 yang berlaku di

Indonesia (PSAK No. 27 tahun 2007), laporan keuangan koperasi terdiri dari: perhitungan Hasil Usaha, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan atas Laporan Keuangan, (Purnamawati, 2018). Dengan laporan keuangan tersebut dapat dilakukan perhitungan penilaian kesehatan keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi sangat berguna untuk memberikan gambaran kondisi terkini koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kesehatan koperasi dianalisis dengan tujuh aspek penilaian yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Jatidiri Koperasi. Hasil penilaian kesehatan koperasi akan menunjukkan predikat koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus, dengan mengetahui kondisi kesehatan koperasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan guna pengembangan koperasi, sehingga terwujudnya pengelolaan KPRI yang sehat, efektif, efisien, dan professional untuk terus meningkatkan kualitasnya. Data awal untuk analisis rasio dari ketujuh aspek penilaian kesehatan keuangan dapat dilihat pada lampiran 3.

Pada lampiran 3 diketahui persentasi rasio penilaian kesehatan keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong tahun 2020-2022 dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi setiap rasio dari tahun 2020-2022 mengalami perubahan, ada rasio yang mengalami penurunan, kenaikan dan hasil yang tetap pada setiap tahunnya, dari persentasi rasio tersebut dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Penelitian serupa telah banyak dilakukan sebelumnya antara lain (Hodsay & Yolanda, 2019) melakukan penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2, Palembang, menurut hasil penelitian tersebut kesehatan keuangan KSP Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 pada tahun 2015-2017 menunjukkan predikat dalam pengawasan. Penelitian (Fauzi & Setiawan, 2021) dilakukan pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Ngudi Lestari dengan hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan koperasi tersebut pada tahun 2015 berpredikat dalam pengawasan, pada tahun 2016-2019 berpredikat cukup sehat, penelitian (Endrekson, 2022) dilakukan pada Koperasi Kartika Dwipangga dengan hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan pada tahun 2019 berpredikat cukup sehat, penelitian (Hayati, Rudiana, & Rizqiani, 2022) dilakukan pada koperasi Syariah BMT Al-Karomah

dengan hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan pada tahun 2021 berpredikat cukup sehat, penelitian (Anistya, Bahri, & Wahyudi, 2022) dilakukan pada koperasi Setia Budi Wanita dengan hasil penelitian menunjukkan penilaian kesehatan pada tahun 2017-2021 berpredikat cukup sehat.

Berdasarkan penelitian yang disebutkan sebelumnya menghasilkan kesimpulan yang beragam, namun pada intinya analisis kesehatan keuangan koperasi sangat perlu untuk dilakukan secara berkelanjutan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan manajerial, oleh karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian serupa pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong atas laporan keuangan pada tahun 2020-2022.

Penulis memilih KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong sebagai obyek penelitian atas dasar ketertarikan pada koperasi tersebut, dan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong belum melakukan penilaian kesehatan pada tahun buku 2020-2022, juga koperasi ini sudah berdiri cukup lama dan telah banyak membantu perekonomian anggotanya, atas dasar ketertarikan ini, penulis ingin memberikan sumbangsih dengan melakukan analisis kesehatan keuangan, sehingga dari hasil penelitian nanti dapat dimanfaatkan oleh KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dan Koperasi lainnya dikemudian hari. Penulis melakukan analisis berdasarkan ketujuh aspek yang ada pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit



Simpan Pinjam Koperasi, dengan menggunakan aspek penilaian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong. Berdasarkan hal tersebut maka penulis memilih dan memberikan judul pada penelitian ini yaitu “Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kesehatan Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi (Studi pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong tahun 2020-2022)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong selama tahun 2020-2022 dilihat dari aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hasil tingkat kesehatan keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dilihat dari aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi,

Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi pada tahun 2020-2022.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan berbagai manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan serta pengalaman penelitian pada bidang keuangan juga dari penelitian akhir ini dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai tatacara penilaian tingkat kesehatan koperasi, diharapkan juga dapat mendukung teori dan hasil penelitian terdahulu:

- a. Mendukung Teori

Mendukung teori analisis kesehatan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

b. Mendukung Penelitian Terdahulu

1) Berpengaruh positif

- a) Penelitian dari (Hayati, Rudiana, & Rizqiani, 2022) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi Syariah BMT Al-Karomah Martapura”. Dengan hasil tingkat kesehatan pada tahun 2021 berpredikat cukup sehat.
- b) Penelitian dari (Endrekson, 2022) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Pada Primer Koperasi Kartika Dwipangga Karang Endah”. Dengan hasil tingkat kesehatan pada tahun 2019 berpredikat cukup sehat.
- c) Penelitian dari (Anistya, Bahri, & Wahyudi, 2022) dengan judul “Analisis Penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang Tahun 2019-2021)”. Dengan hasil penilaian kesehatan berpredikat cukup sehat.
- d) Penelitian dari (Fauzi & Setiawan, 2021) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Ngudi Lestari Desa Sanan, Girmarto, Wonogiri)”. Dengan tingkat kesehatan pada tahun 2015

berpredikat dalam pengawasan, dan pada tahun 2016-2019 berpredikat cukup sehat.

2) Berpengaruh negative

- a) Penelitian dari (Hodsay & Yolanda, 2019) dengan judul “Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 Palembang”. Dengan peroleh hasil KSP menunjukkan predikat dalam pengawasan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana dalam mengembangkan wawasan yang didapat selama perkuliahan serta mengasah daya analisis dalam memecahkan masalah terkait penilaian kesehatan koperasi.

b. Bagi KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong

- 1) Dapat dijadikan sebagai referensi untuk menganalisis tingkat kesehatan koperasi pada periode berikutnya.
- 2) Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan pengambilan kebijakan untuk tindak lanjut dalam hal perbaikan dari segi aspek keuangan dan manajemen perkoperasian.

c. Bagi Masyarakat Luas

- 1) Bagi akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian yang relevan dan menambah ilmu pengetahuan serta pengembangan terhadap analisis kesehatan koperasi.

- 2) Bagi masyarakat pada umumnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menjadi bagian atau sebagai anggota, serta mengembangkan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penulis yang berhubungan dengan analisis tingkat kesehatan koperasi:

1. Penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi Syariah BMT Al-Karomah Martapura” oleh (Hayati, Rudiana, & Rizqiani, 2022), penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif dan jenis penelitian kualitatif yang berpedoman pada peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti menyimpulkan berdasarkan 8 aspek penilaian kesehatan pada laporan keuangan tahun 2021. USPPS Koperasi Syariah BMT Al-Karomah Martapura pada aspek permodalan dengan skor 10,00 aspek kualitas aktiva produktif dengan skor 15,25 aspek manajemen dengan skor 11,30 aspek efisiensi dengan skor 7,50 aspek likuiditas dengan skor 6,25 aspek jatidiri koperasi dengan skor 10,00 aspek kemandirian dan pertumbuhan dengan skor 8,50 dan aspek kepatuhan prinsip syariah dengan skor 6,00 dapat disimpulkan bahwa secara umum USPPS Koperasi Syariah BMT Al-Karomah Martapura termasuk pada kategori cukup sehat dengan skor akhir 74,80.

2. Peneliti (Endrekson, 2022), dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Pada Primer Koperasi Kartika Dwipangga Karang Endah”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan berpedoman pada peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dengan metode pengumpulan data berupa data sekunder dan wawancara. Peneliti menyimpulkan dari 7 aspek penilaian kesehatan pada laporan keuangan tahun 2019 yang meliputi aspek Permodalan dengan skor 11,25 aspek Kualitas Aktiva Produktif dengan skor 16,25 aspek Manajemen dengan skor 13,80 aspek Efisiensi dengan skor 10,00 aspek Likuiditas dengan skor 7,50 aspek Kemandirian Dan Pertumbuhan dengan skor 8,50 aspek Jatidiri Koperasi dengan skor 10,00 berdasarkan perolehan skor tersebut Koperasi Kartika Dwipangga mendapat predikat cukup sehat dengan skor akhir 77,30.
3. Penelitian dengan judul “Analisis Penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang Tahun 2019-2021” oleh (Anistya, Bahri, & Wahyudi, 2022). Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kuantitatif eksploratif dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/3/IV/2016 dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menyimpulkan dari 7 aspek penilaian tingkat kesehatan pada tahun 2019-2021 menunjukkan tingkat kesehatan Koperasi Setia Budi Wanita Malang sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Rekap Penilaian Kesehatan Koperasi Setia Budi Wanita Malang**

No.	Aspek yang dinilai	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Permodalan	15,00	15,00	15,00
2	Kualitas Aktiva Prduktif	16,25	16,25	16,25
3	Manajemen	12,6	12,6	12,6
4	Efisiensi	7,00	7,00	7,00
5	Likuiditas	5,00	3,75	3,75
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	1,5	1,5	1,5
7	Jatidiri Koperasi	7,00	7,00	7,00
<b>Skor Akhir</b>		<b>64,35</b>	<b>63,10</b>	<b>63,10</b>

**Sumber:** (Anistya, Bahri, & Wahyudi, 2022)

Berdasarkan tabel 2.1 data diatas pada tahun 2019-2021 skor akhir mengalami penurunan yang bersumber pada aspek likuiditas, namun penurunan tersebut tidak terlalu berpengaruh pada penilaian kesehatan sehingga rata-rata skor tersebut berjumlah 63,52 dengan predikat cukup sehat.

4. Peneliti (Fauzi & Setiawan, 2021) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Ngudi Lestari Desa Sanan, Girimarto, Wonogiri)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan kuesioner. Peneliti menyimpulkan dari 7 aspek penilaian kesehatan pada laporan keuangan tahun 2015-2019 menunjukkan tingkat kesehatan LKM Ngudi Lestari sebagai berikut:



**Tabel 2.2 Rekap Penilaian Kesehatan LKM Ngudi Lestari**

No.	Aspek yang dinilai	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Permodalan	9,00	5,40	9,00	9,00	9,00
2	Kualitas Aktiva Prduktif	13,25	14,75	14,75	14,75	15,25
3	Manajemen	12,90	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Efisiensi	4,00	7,00	3,00	3,00	5,00
5	Likuiditas	7,50	15,00	13,75	15,00	15,00
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	4,50	5,25	4,50	4,50	4,50
7	Jatidiri Koperasi	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
<b>Skor Akhir</b>		<b>57,65</b>	<b>68,90</b>	<b>66,50</b>	<b>67,75</b>	<b>70,25</b>

**Sumber:** (Fauzi & Setiawan, 2021)

Berdasarkan tabel 2.2 data diatas dapat diketahui pada tahun 2015 dengan jumlah skor akhir 57,65 mendapat predikat dalam pengawasan, kemudian pada tahun 2016 dengan skor akhir 68,90 pada tahun 2017 dengan skor akhir 66,50 pada tahun 2018 dengan skor akhir 67,75 dan pada tahun 2019 dengan skor akhir 70,25 dengan rata-rata skor 68 berpredikat cukup sehat.

5. Penelitian dengan judul “Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 Palembang” oleh (Hodsay & Yolanda, 2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan angket yang berpedoman pada Peraturan Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis laporan keuangan dari tahun 2015 sampai 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permodalan mendapat skor 10,50 dengan kategori cukup sehat, kualitas aktiva produktif mendapat skor 11,25 dengan kategori kurang sehat, manajemen mendapat skor 13,75 dengan kategori cukup sehat,

efisiensi mendapat skor 10,00 dengan kategori sehat, likuiditas mendapat skor 6,25 dengan kategori kurang sehat, kemandirian dan pertumbuhan mendapat skor 6,00 dengan kategori kurang sehat, jati diri koperasi rerata 4,70 dengan kategori kurang sehat. Tingkat kesehatan koperasi selama 3 tahun (2015-2017) secara berturut-turut sebesar 66,40, 64,45, dan 62,15. Dengan demikian rerata 64,40 sehingga dikelompokkan dalam kategori dalam pengawasan.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Koperasi**

#### **a. Pengertian Koperasi**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Penjelasan mengenai pengertian koperasi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang didirikan dari perkumpulan orang-orang dengan tujuan yang sama berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

#### **b. Tujuan Koperasi**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada BAB II Landasan, Asas,

dan Tujuan pasal 3 Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umum, juga membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penulis menyimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah sebuah organisasi yang dibentuk dengan tujuan mensejahterakan anggotanya, bukan sebuah organisasi yang semata-mata untuk mencari keuntungan, karena koperasi berasaskan kekeluargaan.

### **c. Fungsi dan Peran Koperasi**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada BAB III Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi, Bagian Pertama Fungsi dan Peran Pasal 4 Fungsi dan peran koperasi adalah:

- 1) Membangun, mengembangkan potensi, dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat;
- 3) Memperkokoh ekonomi rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- 4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### **d. Bentuk Koperasi**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada BAB IV Pembentukan Pasal 15 “Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder”.

##### 1) Koperasi Primer

Pada BAB IV Pembentukan Pasal 6 “Koperasi primer dibentuk oleh sekurang – kurangnya 20 orang”.

##### 2) Koperasi Sekunder

Pada BAB IV Pembentukan Pasal 7 “Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi”.

#### **e. Jenis Koperasi**

##### 1) Berdasarkan Jenis Usahanya

Koperasi terdiri atas 4 jenis yaitu: Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi. (Purnamawati, 2018)

##### a) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Kegiatan koperasi simpan pinjam yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman, koperasi ini hanya memiliki satu jenis usaha yaitu simpan pinjam. Pada koperasi ini anggota yang menabung akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa.

b) Koperasi Serba Usaha (KSU)

KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Contohnya unit pertokoan untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota dan masyarakat sekitar, unit simpan pinjam, dan unit lainnya.

c) Koperasi Konsumsi

Koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota disebut koperasi konsumsi. Misalnya kebutuhan perabot rumah tangga, bahan makanan, dan pakaian..

d) Koperasi Produksi

Koperasi yang bidang usahanya membuat barang dan menjual secara bersama disebut koperasi produksi. Kebanyakan anggota koperasi ini sudah memiliki usaha kemudian melalui koperasi anggota mendapatkan bantuan berupa modal dan pemasaran.

2) Berdasarkan Keanggotaannya

Koperasi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya berikut ini: (Purnamawati, 2018)

a) Koperasi Unit Desa (KUD)

KUD adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama bidang pertanian, perdagangan dan buruh lainnya, contoh kegiatannya seperti menyediakan obat pemberantas hama tanaman, menyediakan pupuk,

menyediakan benih, menyediakan alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.

b) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Koperasi ini awalnya bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN) kemudian berubah menjadi KPRI. Tujuan dari KPRI adalah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. KPRI didirikan di lingkungan departemen atau instansi.

c) Koperasi Sekolah

Anggota dari koperasi sekolah adalah warga sekolah, yang meliputi guru, karyawan, dan siswa, contoh kegiatannya adalah menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti alat tulis, potocopy, makanan, buku pelajaran, dan lain-lain.

## **2. Unit Simpan Pinjam**

### **a. Pengertian Unit Simpan Pinjam**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi unit simpan pinjam koperasi disebut juga USP adalah unit usaha yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

### **b. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada BAB VII Kegiatan usaha Pasal 19 menyebutkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam meliputi:

- 1) Menghimpun simpanan dari anggota;
- 2) Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
- 3) Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.

### **3. Laporan Keuangan Koperasi**

Menurut Harahap (2001:105) dalam (Purnamawati, 2018) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dari hasil usaha perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Kemudian menurut Haryono Jusup (2002:11) dalam (Purnamawati, 2018) menyebutkan laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi. Dalam definisi ini disebutkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan dari suatu organisasi.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan usaha suatu organisasi dalam periode tertentu yang didalamnya memuat seluruh pencatatan yang berhubungan dengan hasil usahanya kemudian dilaporkan kepada

pihak yang memerlukan, pada perkoperasian laporan keuangan dibuat oleh manajer yang ditandatangani oleh seluruh pengurus dan pengawas koperasi, yang kemudian akan dilaporkan kepada anggota pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT), dalam laporan tersebut dimuat laporan perhitungan hasil usaha, neraca, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan, dengan laporan keuangan tersebut anggota dapat mengetahui semua informasi mengenai keuangan koperasi.

#### **4. Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi**

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

##### **a. Aspek Permodalan**

##### **1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

Ketetapan untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset adalah sebagai berikut:

- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100
- c) Rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5
- d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.



**Tabel 2.3 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset:**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1 – 20	25	6	1.50
21 – 40	50	6	3.00
41 – 60	100	6	6.00
61 – 80	50	6	3.00
81 – 100	25	6	1.50

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

**2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko**

Ketetapan untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko, sebagai berikut:

- a) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- b) Setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

**Tabel 2. 4 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
0	0		0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- a) Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

**Tabel 2.5 Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

#### b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian kualitas aktiva produktif berdasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

1) **Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan;**

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
>75	100	10	10,00

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) **Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan**

Ketetapan untuk memperoleh risiko-risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, sebagai berikut:

a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:

(1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)

(2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR); dan

(3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)

b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan

$$RPM = \frac{((50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100) \times Pm)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan Penilaian:

- (1) Untuk Rasio 45% atau lebih diberi nilai 0
- (2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan
- (3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

**Tabel 2.7 Standar Perhitungan Risiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
40 < x < 45	10	5	0,5
30 < x ≤ 40	20	5	1,0
20 < x ≤ 30	40	5	2,0
10 < x ≤ 20	60	5	3,0
0 < x ≤ 10	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 3) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

- a) Untuk Rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0
- b) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor Penilaian

**Tabel 2.8 Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

#### 4) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 2.9 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
<21	100	5	5,00

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

Sebelum menghitung rasio-rasio tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini:

##### A. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran, yaitu:
  - a. Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/ atau mingguan; atau
  - b. Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa

angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan; atau

- c. Tunggakan melampaui 6 (enam) bulan, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau

2. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:

- a. Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
- b. Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

B. Pengembalian Pinjaman Tanpa Angsuran, yaitu:

1. Pinjaman belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan

2. Pinjaman telah jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan

C. Pinjaman Yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, namun berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang- kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

#### D. Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila:

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau
2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan; atau
3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

### c. Aspek Penilaian Manajemen

#### 1) Penilaian Aspek

Penilaian Aspek Manajeme didasari oleh lima komponen sebagai berikut:

- a) Manajemen Umum

**Tabel 2.10 Standar Perhitungan Manajemen Umum**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25

Jumlah Jawaban Ya	Skor
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Kelembagaan

**Tabel 2.11 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Manajemen Permodalan

**Tabel 2.12 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

d) Manajemen Aktiva

**Tabel 2.13 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70



Jumlah Jawaban Ya	Skor
10	3,00

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

e) Manajemen Likuiditas

**Tabel 2.14 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 2) Perhitungan Nilai

Perhitungan nilai berdasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) ; dan
- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”),

#### d. Aspek Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi koperasi berdasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

- 1) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto

Perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto, sebagai berikut:

- a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.15 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

- 2) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.16 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor**

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$\leq 40$	100	4	4

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 3) Rasio efisiensi pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.17 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio Efisiensi Staf (Persen)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

Rasio-rasio di atas menggambarkan seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya

#### e. Aspek Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

##### 1) Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.18 Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
$>20$	25	10	2,5

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

##### 2) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan

- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.19 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima**

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

#### f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

##### 1) Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

**Tabel 2.20 Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber: Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.21 Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio Rentabilitas	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 3$	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 3) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.22 Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional**

Rasio Kemandirian	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	4	0
$>100$	100	4	4

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

**g. Aspek Jatidiri Koperasi**

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota, aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik, partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian

**Tabel 2.23 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto:**

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.24 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota**

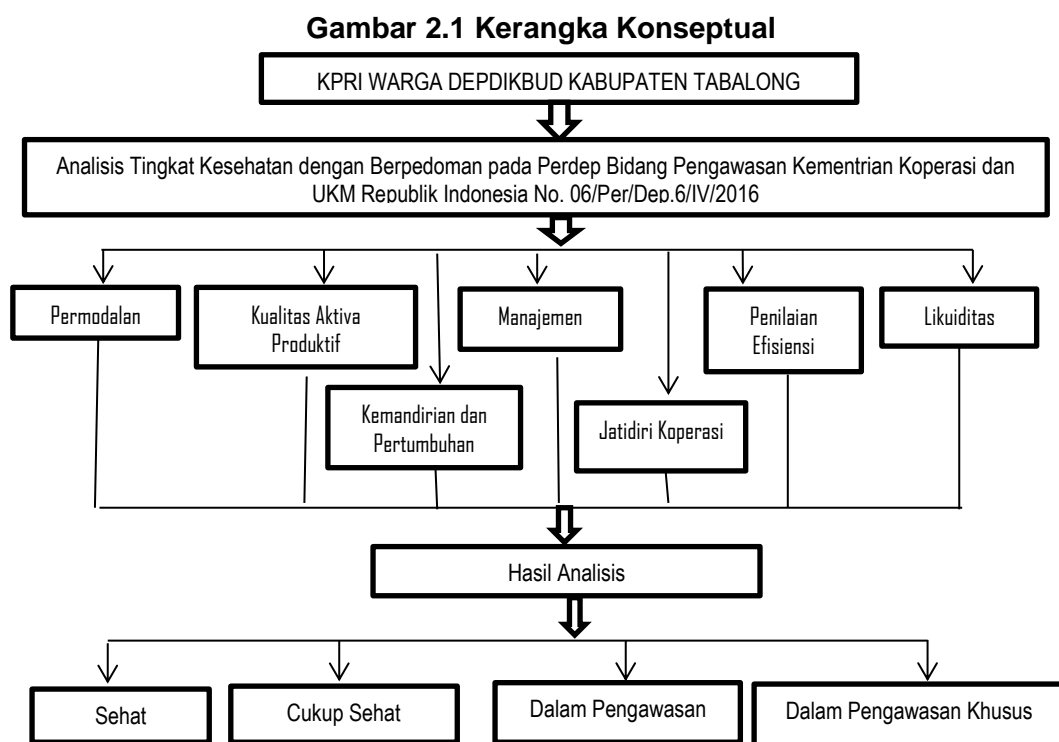
Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016



### C. Kerangka Konseptual

Penelitian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) berpedoman pada peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Penilaian Kesehatan terdiri dari tujuh aspek sesuai Peraturan Deputi tersebut, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek penilaian efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi. Hasil dari tujuh aspek penilaian tersebut berupa skor yang akan menunjukkan kondisi kesehatan KSP/USP dengan terbagi menjadi empat predikat, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus, adapun kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut.



Sumber: Data diolah, 2023

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Hermawan, 2019) metode kuantitatif adalah penelitian yang sifatnya induktif, objektif, dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang di nilai, dan dianalisis dengan analisis statistik. Pendekatan deskriptif menurut (Sriekaningsih & Daengs, 2020) bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang, dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.

Menurut (Yusuf, 2014) Penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Penulis memilih metode ini karena data yang digunakan pada penelitian ini berupa angka-angka yang akan dianalisis dengan analisis statistik yang kemudian di deskripsikan secara sistematis tanpa mengubah faktanya.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) WARGA DEPDIKBUD Kabupaten Tabalong yang beralamat di Jalan Kamboja RT. X No. 64 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

## **C. Sumber Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, menurut (Umar, 2003) data primer dan data sekunder adalah:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, seperti dari individu atau perseorangan, data bisa berupa hasil wawancara, pengisian kuesioner, bisa juga berupa bukti transaksi seperti tanda bukti pembelian barang dan karcis parkir, semua data yang disebutkan itu merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Data primer dari penelitian ini bersumber dari pengurus KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong seperti hasil survey, kuesioner, observasi, dan wawancara.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya sehingga lebih informatif oleh pihak lain. Data sekunder kemudian diproses lebih lanjut, misalnya laporan keuangan seperti neraca dan rugi-laba dapat diolah untuk menilai

kinerja perusahaan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2022, pedoman penilaian kesehatan KSP/USP sesuai dengan Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

##### **1. Dokumentasi**

Menurut (Hodsay & Yolanda, 2019) dokumentasi adalah mencari data, mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), isi laporan tersebut berupa necara, laporan hasil usaha, dan lainnya yang akan digunakan untuk penilaian kesehatan sesuai dengan Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang meliputi aspek permodalan, aspek aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi.

##### **2. Observasi**

Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu, tujuan penelitian ini untuk mengamati dan memahani perilaku kelompok maupun individu pada keadaan tertentu (Tersiana, 2018), observasi pada penelitian ini telah dilakukan pada saat praktek kerja mahasiswa, penulis melakukan observasi terhadap keadaan koperasi dalam menjalankan tugas sehari-

hari seperti melayani anggota, melakukan transaksi dengan anggota dan lainnya.

### 3. Wawancara

Wawancara menurut (Tersiana, 2018) merupakan cara penelitian yang prosesnya untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan manajer KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong yang berjumlah satu orang untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi dari aspek manajemen yang berpedoman pada Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016.

## **E. Analisis Data**

Menurut (Hodsay & Yolanda, 2019) analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan bahan orang lain. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Analisis Deskriptif, menurut (Purtowo, 2007) analisis data deskriptif adalah cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum/generalisasi. Adapun tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Mendapatkan data laporan keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong periode 2020-2022.

2. Melakukan wawancara untuk memperoleh data pada aspek manajemen dan data lainnya yang dibutuhkan dari pengurus KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong.
3. Melakukan perhitungan dan penilaian tingkat kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong pada tahun buku 2020-2022. Berdasarkan Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 ada 7 aspek yang akan dilakukakan penilaian yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek penilaian manajemen, aspek penilaian efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi. Dari 7 aspek tersebut diberi bobot penilaian sesuai dengan seberapa besar pengaruh terhadap kesehatan koperasi. Berikut ini bobot penilaian aspek dan komponen kesehataan:

**Tabel 3.1 Aspek Penilaian Kesehatan KSP/USP**

No	Aspek yg Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	
2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	10	

No	Aspek yg Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
		b. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ <p>Catatan: Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan pinjaman</p>	5	
		d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi			10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$ <p>Catatan: Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional</p>	4	
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	2	
5	Likuiditas			15
		a. Rasio Kas	10	

No	Aspek yg Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
		$\frac{Kas + Bank}{Kewajiban Lancar} \times 100\%$ <p>b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima</p> $\frac{Pinjaman\ yang\ diberikan}{Dana\ yang\ diterima} \times 100\%$ <p>Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi</p>	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		<p>a. Rentabilitas Aset</p> $\frac{SHU\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Aset} \times 100\%$ <p>b. Rentabilitas Modal Sendiri</p> $\frac{SHU\ Bagian\ Anggota}{Total\ Modal\ Sendiri} \times 100\%$ <p>c. Kemandirian Operasional Pelayanan</p> $\frac{Partisipasi\ Neto}{Beban\ Usaha + Beban\ Perkoperasian} \times 100\%$ <p>Catatan: Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota</p>	3 3 4	
7	Jatidiri Koperasi			10
		<p>a. Rasio partisipasi bruto</p> $\frac{Partisipasi\ Bruto}{Partisipasi\ bruto + Pendapatan} \times 100\%$ <p>b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)</p> $\frac{PEA}{Simpanan\ Pokok + Simpanan\ Wajib} \times 100\%$ <p><math>PEA = MEPPP + SHU\ Bagian\ Anggota</math></p>	7 3	
		Jumlah		100

**Sumber:** Perdep KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Perhitungan penilaian terhadap 7 aspek tersebut diatas kemudian diperoleh skor secara keseluruhan, skor yang diperoleh dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:



1. Sehat,
2. Cukup Sehat,
3. Dalam Pengawasan, dan;
4. Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat kesehatan KSP/USP sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP**

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x \leq 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x \leq 66.00$	Dalam Pengawasan
$< 51.00$	Dalam Pengawasan Khusus

**Sumber:** Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Penyesuaian Data Penelitian**

Data yang akan diteliti untuk dianalisis dan dilakukan pembahasan adalah berupa laporan keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dari tahun 2020-2022, dalam melakukan analisis laporan keuangan untuk menilai kesehatan keuangan koperasi ada beberapa penyesuaian yang berhubungan dengan temuan penelitian, antara lain:

- a. KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong hanya memberikan pinjaman kredit kepada anggotanya.
- b. Tidak ada risiko pinjaman bermasalah di KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong selama tahun 2020-2022.
- c. Cadangan risiko yang digunakan untuk menutupi risiko pinjaman bermasalah diambil dari cadangan risiko ditambah akumulasi penyusutan piutang atau penyisihan penghapusan aktiva produktif.
- d. Pada KPRI Warga Depdikbud tidak terdapat pinjaman diberikan berisiko karena setiap anggota memiliki agunan yang memadai yaitu pembayaran langsung dipotong gaji setiap bulannya, juga pinjaman yang diberikan >5 juta wajib asuransi pinjaman.

##### **2. Sejarah Berdirinya KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong**

KPN-RI WARGA DEPDIKBUD berdiri pada tanggal 9 April 1988 dengan Nomor Badan Hukum 2714.a/BH/IX/88 tertanggal 4 November 1988 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor Badan Hukum

2714.b/BH/IX/96 tanggal 18 Januari 1996. KPN Warga Depdikbud ini merupakan penggabungan (amalgamasi) dari KPN – KPN guru di lingkungan Depdikbud yang ada di daerah Kabupaten Tabalong, antara lain KPN Rukun Guru – guru (Tanjung), KPN Hemat (Kelua), KPN Mufakat (Haruai), KPN Sejahtera (Banua Lawas), KPN Jaya (Muara Uya), serta karyawan Depdikbud / Cabang Dinas P & K Kabupaten Tabalong.

### 3. Visi dan Misi KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong

a. Visi: Bersama Kita Sejahtera

b. Misi:

- 1) Menjalin hubungan silaturahmi yang baik dan bersinergi antara anggota untuk membangun dan memperkokoh kebersamaan.
- 2) Mengembangkan manajemen yang efektif dan efisien berlandaskan prinsip dasar dan nilai – nilai koperasi dengan memanfaatkan secara arif ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengelolaan organisasi yang dikelola koperasi maupun anggotanya.
- 3) Meningkatkan profesionalisme dan etika bisnis perkoperasian serta siapapun yang bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan koperasi secara berkelanjutan.
- 4) Memberikan pelayanan yang baik untuk anggota.

## **B. Temuan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui Kesehatan keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 2020-2022, penelitian ini berpedoman pada Peraturan

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Hasil dari penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui perkembangan kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Berikut analisis deskriptif yang akan digunakan untuk penilaian sesuai Perdep KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang meliputi aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek penilaian efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi.

#### **1. Penilaian Aspek Permodalan**

Penilaian pada aspek permodalan dilakukan dengan 3 rasio perhitungan modal yang meliputi perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan rasio kecukupan modal sendiri. Penilaian pada aspek permodalan bertujuan untuk mengetahui informasi kecukupan modal dalam kegiatan operasional koperasi, berikut perhitungan aspek permodalan dalam 3 rasio:

##### **a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset**

Perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan modal sendiri KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong terhadap total aset atau kekayaan yang dimiliki koperasi untuk mendukung dalam hal pendanaan. Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah

perbandingan antara modal sendiri dengan total aset. Rumus dari rasio tersebut adalah:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan dari rasio modal sendiri terhadap total aset:

**Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio (%)
2020	11.294.342.087	16.599.052.162	68,04
2021	11.758.369.702	17.410.422.899	67,54
2022	11.544.097.271	17.462.754.619	66,11

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.1 diperoleh rasio pada tahun 2020 sebesar 68,04% dan pada tahun 2021 sebesar 67,54% kemudian pada tahun 2022 sebesar 66,11% yang mana pada rasio tersebut mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020-2022 dikarenakan modal sendiri yang tidak stabil dan total aset mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari rasio tersebut berada pada rentang 61%-80%. Kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	68,04%	50	6%	3
2021	67,54%	50	6%	3
2022	66,11%	50	6%	3

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari tahun 2020-2022 memiliki nilai yang sama yaitu 50 dengan skor masing-masing 3, diketahui dari persentasi rasio tersebut menunjukkan nilai yang rendah karena nilai maksimal pada rasio modal sendiri terhadap total aset berjumlah 100 dengan skor 6 yang dapat diperoleh jika rentang rasio berada pada 41%-

60%. Hal ini menunjukkan bahwa KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong berada pada rasio yang cukup besar karena melebihi rasio dengan nilai maksimal sehingga perlu untuk menyeimbangkan antara modal sendiri terhadap total asetnya.

**b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko**

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menutupi risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung dengan agunan yang memadai, rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, rumus dari rasio tersebut adalah:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan dari rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko:

**Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko**

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	Pinjaman diberikan yang berisiko (Rp)	Rasio (%)
2020	11.294.342.087	0	∞
2021	11.758.369.702	0	∞
2022	11.544.097.271	0	∞

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.3 menunjukkan hasil rasio yang tidak terbatas pada tahun 2020-2022 dikarenakan tidak ditemukan pinjaman diberikan yang berisiko pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong, hal ini memberikan hasil bahwa koperasi ini menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan

pinjaman kepada anggotanya, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan berisiko pada koperasi ini memiliki kualitas yang sangat baik karena melebihi presentasi dengan rasio terbesar yang berada pada 91%-100% kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Penskoran Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	∞	100	6%	6
2021	∞	100	6%	6
2022	∞	100	6%	6

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari tahun 2020-2022 dengan rasio yang tidak terbatas setiap tahunnya memperoleh nilai maksimal pada rasio ini yaitu 100 dengan skor 6.

### c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio kecukupan modal sendiri adalah rasio untuk mengetahui perbandingan antara modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%, modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal dari koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) adalah jumlah hasil kali setiap komponen aktiva dari koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, rumus dari rasio kecukupan modal sendiri adalah:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan dari rasio kecukupan modal sendiri:

**Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

Tahun	Modal Sendiri Terimbang (Rp)	ATMR (Rp)	Rasio (%)
2020	10.890.741.396	9.405.158.846	115,80
2021	11.387.638.639	10.078.242.201	112,99
2022	11.237.567.808	9.616.276.697	116,86

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa persentasi rasio pada tahun 2020 sebesar 115,80% dan pada tahun 2021 sebesar 112,99% kemudian pada tahun 2022 sebesar 116,86%, hal tersebut menunjukkan bahwa modal KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong memiliki kualitas yang sangat baik dalam mendukung aktiva tertimbang menurut risiko meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami sedikit penurunan rasio namun masih berada pada rentang >8%, kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Penskoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	115,80%	100	3%	3
2021	112,99%	100	3%	3
2022	116,86%	100	3%	3

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.6 diketahui selama tahun 2020-2022 memiliki nilai yang sama yaitu 100 dengan skor 3 yang merupakan nilai maksimal pada rasio kecukupan modal sendiri.

## 2. Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas dari kekayaan koperasi yang dapat menghasilkan pendapatan untuk koperasi, penilaian pada aspek ini dilakukan dengan perhitungan 4 rasio yang meliputi: rasio volume pinjaman pada anggota



terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

**a. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Diberikan**

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan adalah untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memenuhi seluruh pinjaman anggota, rumus dari perhitungan rasio ini adalah:

$$\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan:

**Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Diberikan**

Tahun	Volume Pinjaman pada Anggota (Rp)	Volume Pinjaman (Rp)	Rasio (%)
2020	4.590.734.160	9.210.259.689	49,84
2021	3.754.610.237	9.891.131.029	37,96
2022	3.936.000.000	9.496.795.297	41,45

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.7 diperoleh rasio pada tahun 2020 berjumlah 49,84% dan pada tahun 2021 berjumlah 37,96% kemudian rasio pada tahun 2022 berjumlah 41,45% yang mana dapat diketahui pada rasio tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 kemudian naik pada tahun 2022 namun tidak melebihi rasio pada tahun 2020, dari rasio tersebut berada pada rentang 26%-50%. Kemudian dilakukan penskoran untuk rasio ini sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Penskoran Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Diberikan**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	49,84%	50	10%	5
2021	37,96%	50	10%	5
2022	41,45%	50	10%	5

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.8 diketahui pada tahun 2020-2022 memperoleh nilai yang sama yaitu 50 dengan skor 5, dari nilai tersebut masih cukup jauh untuk memperoleh nilai maksimal yang dapat diperoleh jika persentasi rasio berada pada rentang >75%. Peningkatan rasio dapat dilakukan dengan menambah jumlah volume pinjaman pada anggota sehingga angka rasio dapat meningkat dan memperoleh nilai maksimal.

**b. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan**

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan merupakan penilaian untuk mengetahui besarnya risiko pinjaman bermasalah dari seluruh pinjaman yang diberikan, rumus perhitungan rasio ini adalah:

$$\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Berikut adalah perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

**Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan**

Tahun	Pinjaman Bermasalah (Rp)	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Rasio (%)
2020	0	9.210.259.689	0
2021	0	9.891.131.029	0
2022	0	9.496.795.297	0

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.9 diketahui pada tahun 2020-2022 tidak ditemukan pinjaman yang bermasalah pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong sehingga dari perbandingan tersebut memperoleh rasio 0% selama 3 tahun. Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	0%	100	5%	5
2021	0%	100	5%	5
2022	0%	100	5%	5

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.10 diketahui dari rasio 0% memperoleh nilai maksimal 100 dengan skor 5, dengan begitu dapat dikatakan bahwa risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan oleh KPRI Warga Depdikbud Kabupateb Tabalong tidak ada sama sekali.

### c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kualitas cadangan risiko dalam mengatasi pinjaman yang bermasalah. Dana cadangan risiko ditambah dengan dana akumulasi penyusutan pinjaman atau penyisihan penghapusan aktiva produktif, rumus dari perhitungan rasio ini adalah:

$$\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

Berikut ini perhitungan dari rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah:

**Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah**

Tahun	Cadangan Risiko (Rp)	Pinjaman Bermasalah (Rp)	Rasio (%)
2020	84.156.127	0	$\infty$
2021	125.621.434	0	$\infty$
2022	170.655.540	0	$\infty$

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.11 diketahui pada tahun 2020-2022 dana cadangan risiko selalu bertambah setiap tahunnya namun tidak ada pinjaman yang bermasalah sehingga dari 3 tahun tersebut memperoleh rasio tidak terbatas yang berada pada rentang 91%-100%, kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.12 Penskoran Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	$\infty$	100	5%	5
2021	$\infty$	100	5%	5
2022	$\infty$	100	5%	5

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.12 dari rasio yang tidak terbatas memperoleh nilai 100 dengan skor 5 yang mana pada nilai tersebut merupakan nilai maksimal pada rasio ini, nilai sempurna tersebut diperoleh karena jumlah pinjaman bermasalah yang tidak ada pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong, hal ini membuktikan bahwa dalam 3 tahun berturut-turut koperasi memiliki dana cadangan yang mampu menutupi pinjaman yang bermasalah jika pada tahun selanjutnya ditemukan pinjaman yang bermasalah.

**d. Rasio Pinjaman Yang Berisiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan**

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, pinjaman berisiko merupakan pinjaman yang tidak memiliki agunan. Rumus dari rasio ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Perhitungan dari rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Berisiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan**

Tahun	Pinjaman yang berisiko (Rp)	Pinjaman yg diberikan (Rp)	Rasio (%)
2020	0	9.210.259.689	0
2021	0	9.891.131.029	0
2022	0	9.496.795.297	0

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.13 selama tahun 2020-2022 tidak ada pinjaman yang berisiko dikarenakan pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong yang menjadi agunan peminjam adalah simpanan anggota dan asuransi pada saat pencairan pinjaman, sehingga pada tahun 2020-2022 memperoleh rasio 0% secara berturut-turut yang berada pada rentang <21%, kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.14 Penskoran Rasio Pinjaman Yang Berisiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	0%	100	5%	5
2021	0%	100	5%	5
2022	0%	100	5%	5

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.14 dari rasio 0% pada tahun 2020-2022 memperoleh nilai 100 dengan skor 5 yang merupakan nilai maksimal pada rasio ini sehingga dapat dikatakan pinjaman yang berisiko selama 3 tahun berturut-turut tercatat tidak ada.

### **3. Penilaian Aspek Manajemen**

Penilaian pada aspek manajemen dilakukan dengan wawancara kepada manajer KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong yang didasarkan pada 5 komponen, yaitu: manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas, penilaian pada aspek ini bertujuan untuk mengetahui peran dari pihak manajemen KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan koperasi sehingga operasional dari koperasi berjalan dengan lancar, daftar pertanyaan pada aspek ini berjumlah total 38 yang terbagi pada 5 komponen, yaitu: 12 pertanyaan manajemen umum, 6 pertanyaan manajemen kelembagaan, 5 pertanyaan manajemen permodalan, 10 pertanyaan manajemen aktiva dan 5 pertanyaan manajemen likuiditas. Hasil wawancara pada aspek ini dapat dilihat pada lampiran 8.

#### **a. Manajemen Umum**

Penilaian pada manajemen umum bertujuan untuk mengetahui kemampuan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan kegiatan koperasi, terdapat 12 daftar pertanyaan pada manajemen umum dengan masing-masing jawaban

ya bernilai 0,25 dengan total skor maksimal 3, berikut hasil penilaian pada komponen manajemen:

**Tabel 4.15 Penskoran Manajemen Umum**

Tahun	Jumlah Jawaban "Ya"	Nilai	Skor
2020	10	0,25	2,5
2021	10	0,25	2,5
2022	10	0,25	2,5

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.15 selama tahun 2020-2022 diperoleh 10 jawaban ya dari total 12 pertanyaan sehingga memperoleh skor 2,5 setiap tahunnya.

**b. Manajemen Kelembagaan**

Manajemen kelembagaan adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sistem kerja, terdapat 6 pertanyaan pada manajemen kelembagaan dengan masing-masing jawaban ya bernilai 0,5 dengan skor maksimal 3, berikut hasil penilaian manajemen kelembagaan:

**Tabel 4.16 Penskoran Manajemen Kelembagaan**

Tahun	Jumlah Jawaban "Ya"	Nilai	Skor
2020	6	0,50	3
2021	6	0,50	3
2022	6	0,50	3

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.16 diketahui pada tahun 2020-2022 diperoleh jawaban ya sebanyak 6 dari total pertanyaan 6 sehingga dari manajemen kelembagaan memperoleh skor maksimal yaitu 3.

### c. Manajemen Permodalan

Penilaian manajemen permodalan adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan modal koperasi, terdapat 5 pertanyaan pada manajemen permodalan dengan nilai masing-masing jawaban ya sebesar 0,6 dan skor maksimal 3, berikut hasil penilaian dari komponen manajemen permodalan:

**Tabel 4.17 Penskoran Manajemen Permodalan**

Tahun	Jumlah Jawaban "Ya"	Nilai	Skor
2020	2	0,60	1,2
2021	2	0,60	1,2
2022	2	0,60	1,2

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.17 diketahui pada tahun 2020-2022 diperoleh 2 jawaban ya dari 5 pertanyaan sehingga memperoleh skor 1,2.

### d. Manajemen Aktiva

Penilaian manajemen aktiva bertujuan untuk mengetahui kemampuan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan pinjaman atas aset yang dimiliki koperasi, terdapat 10 pertanyaan pada manajemen aktiva dengan masing-masing jawaban ya bernilai 0,30 dengan skor maksimal 3, berikut hasil perhitungan dari manajemen aktiva:

**Tabel 4.18 Penskoran Manajemen Aktiva**

Tahun	Jumlah Jawaban "Ya"	Nilai	Skor
2020	8	0,30	2,4
2021	8	0,30	2,4
2022	8	0,30	2,4

**Sumber:** Data diolah, 2023



Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.18 diketahui pada tahun 2020-2022 diperoleh 8 jawaban ya dari 10 pertanyaan sehingga memperoleh skor 2,4.

#### e. Manajemen Likuiditas

Penilaian manajemen likuiditas adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan aset yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dari koperasi, terdapat 5 pertanyaan pada manajemen likuiditas dengan masing-masing jawaban ya bernilai 0,60 dengan skor maksimal 3, berikut hasil penilaian komponen manajemen likuiditas:

**Tabel 4.19 Penskoran Manajemen Likuiditas**

Tahun	Jumlah Jawaban "Ya"	Nilai	Skor
2020	3	0,60	1,8
2021	3	0,60	1,8
2022	3	0,60	1,8

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.19 diketahui pada tahun 2020-2022 diperoleh 3 jawaban ya dari 5 pertanyaan sehingga memperoleh skor 1,8.

#### 4. Penilaian Aspek Efisiensi

Penilaian pada aspek efisiensi adalah penilaian yang digunakan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasionalnya, semakin kecil pengeluaran untuk operasional terhadap pendapatan maka dapat dikatakan efisiensi pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong baik, penilaian pada aspek efisiensi didasarkan pada 3 rasio, yaitu: rasio bebab operasi anggota

terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dan rasio efisiensi pelayanan.

**a. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto**

Tujuan penilaian rasio ini untuk mengetahui besarnya beban operasi anggota yang dikeluarkan dalam memperoleh partisipasi bruto, rumus rasio ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan dari rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto:

**Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto**

Tahun	Beban Operasi Anggota (Rp)	Partisipasi Bruto (Rp)	Rasio (%)
2020	15.800.000	1.458.284.251	1,08
2021	9.050.000	1.296.815.965	0,70
2022	12.575.000	1.215.100.178	1,03

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio pada tahun 2020-2022 yang bisa dilihat pada tabel 4.20 diketahui beban operasi anggota pada tahun 2021 mengalami penurunan kemudian naik kembali pada tahun 2022 namun tidak melebihi tahun 2020, kemudian partisipasi bruto setiap tahunnya mengalami penurunan sehingga dari perbandingan tersebut diperoleh rasio pada tahun 2020 sebesar 1,08% dan turun pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,70% kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi sebesar 1,03% dari rasio tersebut berada pada rentang <90% kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.21 Penskoran Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	1,08%	100	4%	4
2021	0,70%	100	4%	4
2022	1,03%	100	4%	4

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.21 pada tahun 2020-2022 memperoleh nilai yang sama yaitu 100 dengan skor 4 yang merupakan nilai maksimal pada rasio ini, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong mampu memberikan efisiensi pelayanan yang baik kepada anggotanya, partisipasi bruto yang tinggi diperoleh dari besarnya kontribusi anggota terhadap koperasi dalam meningkatkan perolehan SHU.

**b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor**

Penilaian rasio beban usaha terhadap SHU kotor merupakan penilaian yang tujuannya untuk mengetahui besarnya beban usaha yang dikeluarkan koperasi dalam memperoleh SHU kotor, rumus rasio ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan dari rasio beban usaha terhadap SHU kotor:

**Tabel 4.22 Hasil Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor**

Tahun	Beban Usaha (Rp)	SHU Kotor (Rp)	Rasio (%)
2020	766.241.210	1.509.908.852	50,75
2021	736.211.791	1.371.762.027	53,67
2022	765.301.277	1.226.720.650	62,39

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 4.22 diketahui rasio pada tahun 2020-2022 mengalami kenaikan, rasio pada tahun 2020 sebesar 50,75% dan pada tahun 2021 sebesar 53,67% kemudian pada tahun 2022 sebesar 62,39% dari rasio tersebut berada pada rentang 40%-60% pada tahun 2020 dan 2021, kemudian berada pada rentang 60%-80% pada tahun 2022. Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.23 Penskoran Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	50,75%	75	4%	3
2021	53,67%	75	4%	3
2022	62,39%	50	4%	2

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.23 diketahui rasio dari tahun 2020-2022 terus mengalami kenaikan, yang mana kenaikan rasio tersebut berdampak pada skor penilaian yang semakin turun, pada tahun 2020-2021 memperoleh nilai 75 dengan skor 3 dan pada tahun 2022 memperoleh nilai 50 dengan skor 2. Penurunan skor tersebut memberikan hasil bahwa KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong kurang berhasil dalam melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang efisien dengan beban usaha yang rendah untuk menghasilkan sisa hasil usaha yang tinggi dari tahun ke tahun.

### c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Penilaian pada rasio efisiensi pelayanan bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya karyawan yang dikeluarkan oleh KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, rumus dari rasio ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Berikut ini hasil perhitungan penilaian rasio efisiensi pelayanan:

**Tabel 4.24 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Tahun	Biaya Karyawan (Rp)	Volume Pinjaman (Rp)	Rasio (%)
2020	203.525.000	9.210.259.689	2,21
2021	200.525.000	9.891.131.029	2,03
2022	201.515.000	9.496.795.297	2,12

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.24 diketahui rasio pada tahun 2020-2022 memperoleh rasio pada tahun 2020 sebesar 2,21% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 2,03% kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 2,12% dari rasio tersebut berada pada rentang <5%. Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.25 Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	2,21%	100	2%	2
2021	2,03%	100	2%	2
2022	2,12%	100	2%	2

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.25 diperoleh nilai yang sama selama tahun 2020-2022 yaitu 100 dengan skor 2 sehingga memperoleh nilai maksimal pada rasio ini, hal tersebut menunjukkan bahwa KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dapat memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya.

## 5. Penilaian Aspek Likuiditas

Penilaian pada aspek likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek,

penilaian pada aspek ini didasarkan pada 2 rasio, yaitu: rasio kas dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

#### a. Rasio Kas

Penilaian pada rasio kas bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan kas yang dimiliki, rumus dari rasio ini adalah:

$$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio kas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.26 Hasil Perhitungan Rasio Kas**

Tahun	Kas dan Bank (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio (%)
2020	5.154.153.838	2.072.972.457	248,64
2021	5.250.205.694	2.002.069.495	262,24
2022	6.038.535.331	2.346.978.315	257,29

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.26 diketahui pada tahun 2020-2022 memperoleh rasio pada tahun 2020 sebesar 248,64% dan pada tahun 2021 sebesar 262,24% kemudian pada tahun 2022 sebesar 257,29% dari persentasi rasio tersebut diketahui pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan rasio kemudian pada tahun 2022 rasio tersebut menurun, dari rasio tersebut berada pada rentang >20%. Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.27 Penskoran Rasio Kas**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	248,64%	25	10%	2,5
2021	262,24%	25	10%	2,5
2022	257,29%	25	10%	2,5

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.27 dari besarnya rasio selama tahun 2020-2022 diperoleh nilai 25 dengan skor 2,5 dari tingginya persentasi rasio dari tahun ke tahun

menyebabkan dampak buruk bagi penilaian kesehatan keuangan karena untuk mendapatkan nilai maksimal rasio kas harus berada pada rentang >10% - 15% dengan skor 100, tingginya persentasi rasio yang diperoleh dari setiap tahunnya dikarenakan kondisi koperasi yang *over liquid* sehingga menyebabkan adanya *idle fund*.

#### b. Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima

Penilaian rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memberikan pinjaman bagi anggota dengan menggunakan dana yang diterima, rumus dari rasio ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dari rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima sebagai berikut:

**Tabel 4.28 Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima**

Tahun	Pinjaman Yang Diberikan (Rp)	Dana Yang Diterima (Rp)	Rasio (%)
2020	9.210.259.689	15.870.282.320	58,03
2021	9.891.131.029	16.788.911.620	58,91
2022	9.496.795.297	17.014.180.646	55,82

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan dari rasio pada tabel 4.28 diketahui pada tahun 2020-2022 pinjaman yang diberikan lebih kecil dari dana yang diterima setiap tahunnya, sehingga dari perbandingan tersebut memperoleh rasio sebesar 58,03%, 58,91%, 55,82% secara berurutan, dari rasio tersebut berada pada rentang <60%. Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.29 Penskoran Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	58,03%	25	5%	1,25
2021	58,91%	25	5%	1,25
2022	55,82%	25	5%	1,25

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.29 diketahui dari tahun 2020-2022 diperoleh nilai yang sama yaitu 25 dengan skor 1,25 yang merupakan nilai terendah pada rasio ini dikarenakan dana yang diterima KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong sangat besar dari jumlah pinjaman yang diberikan, diketahui banyaknya dana yang diterima bersumber dari simpanan sukarena anggota setiap bulannya, untuk meningkatkan skor pada rasio ini adalah dengan meningkatkan pinjaman yang diberikan kepada anggota sehingga dapat memperoleh rentang rasio dengan skor maksimal yaitu pada rasio 80% - < 90%.

## **6. Penilaian Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan**

Penilaian pada aspek kemandirian dan pertumbuhan merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam memperoleh laba dalam pelayanan operasional, perhitungan dari aspek ini didasarkan pada 3 rasio, yaitu: rentabilitas aset, rentabilitas modal sendiri, kemandirian operasional pelayanan

### **a. Rentabilitas Aset**

Rasio rentabilitas aset merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memperoleh SHU



dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki, rumus dari rasio ini sebagai berikut:

$$\frac{SHU \text{ Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan dari rasio rentabilitas aset:

**Tabel 4.30 Hasil Perhitungan Rentabilitas Aset**

Tahun	SHU Sebelum Pajak (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio (%)
2020	713.872.042	16.599.052.162	4,30
2021	635.550.236	17.410.422.899	3,65
2022	461.519.373	17.462.754.619	2,64

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.30 diketahui SHU dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan setiap tahunnya yang berbanding terbalik terhadap total aset yang setiap tahunnya mengalami kenaikan sehingga memperoleh rasio sebesar 4,30%, 3,65%, 2,64% secara berurutan yang berada pada rentang rasio <5%.

Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.31 Penskoran Rentabilitas Aset**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	4,30%	25	3%	0,75
2021	3,65%	25	3%	0,75
2022	2,64%	25	3%	0,75

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.31 diketahui rasio pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan dikarenakan sisa hasil usaha terhadap total aset pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong mengalami penurunan, dengan semakin rendahnya rasio yang diperoleh menunjukkan rentabilitas yang kurang baik sehingga memperoleh nilai terendah yaitu 25 dengan skor 0,75. Solusi untuk meningkatkan rentabilitas salah

satunya dengan meningkatkan jumlah pinjaman yang diberikan untuk anggota koperasi.

#### b. Rentabilitas Modal Sendiri

Penilaian rentabilitas modal sendiri merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memberikan imbalan jasa kepada anggota yang telah berkontribusi dalam menambahkan dana kepada koperasi, rumus dari rasio ini adalah:

$$\frac{SHU \text{ Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan dari rasio rentabilitas modal sendiri:

**Tabel 4.32 Hasil Perhitungan Rentabilitas Modal Sendiri**

Tahun	SHU Bagian Anggota (Rp)	Total Modal Sendiri (Rp)	Rasio (%)
2020	473.700.397	11.294.342.087	4,19
2021	403.982.330	11.758.369.702	3,44
2022	291.573.083	11.544.097.271	2,53

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.32 diketahui pada tahun 2020-2022 diperoleh rasio sebesar 4,19%, 3,44%, 2,53% secara berurutan dan mengalami penurunan setiap tahunnya, diketahui rasio pada tahun 2020 berada pada rentang  $\leq 4\% \times < 5\%$  pada tahun 2021 berada pada rentang  $\leq 3\% \times < 4\%$  kemudian pada tahun 2022 berada pada rentang  $< 3\%$ . Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.33 Penskoran Rentabilitas Modal Sendiri**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	4,19%	75	3%	2,25
2021	3,44%	50	3%	1,50
2022	2,53%	25	3%	0,75

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.33 diketahui dari tahun 2020-2022 memperoleh nilai pada tahun 2020 sebesar 75 skor 2,25 pada tahun 2021 dengan nilai 50 skor 1,50 kemudian pada tahun 2022 dengan nilai 25 skor 0,75. Penurunan nilai pada rasio ini menunjukkan kondisi rentabilitas yang kurang baik, sehingga diharapkan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dapat meningkatkan penggunaan modal untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar.

### c. Kemandirian Operasional Pelayanan

Penilaian kemandirian operasional pelayanan bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan operasional kepada anggota, rumus dari rasio ini adalah:

$$\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan dari rasio kemandirian operasional pelayanan:

**Tabel 4.34 Hasil Perhitungan Kemandirian Operasional Pelayanan**

Tahun	Partisipas Neto (Rp)	Beban Usaha + Beban Perkopersian (Rp)	Rasio (%)
2020	1.442.484.251	766.241.210	188,25
2021	1.287.765.965	736.211.791	174,92
2022	1.202.525.178	765.301.277	157,13

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan pada rasio 4.34 diketahui rasio dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan yaitu 188,25% pada tahun 2020, 174,92% pada tahun 2021, dan 157,13% pada tahun 2022, namun masih berada pada rentang rasio >100%. Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.35 Penskoran Kemandirian Operasional Pelayanan**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	188,25%	100	4%	4
2021	174,92%	100	4%	4
2022	157,13%	100	4%	4

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.35 diketahui nilai dari tahun 2020-2022 sama yaitu 100 dengan skor 4 yang merupakan nilai maksimal pada rasio ini. Hal ini menunjukkan bahwa pada rasio kemandirian operasional pelayanan memiliki kualitas yang maksimal karena beban usaha dan beban perkoperasian yang dikeluarkan sangat efisien dibandingkan dengan partisipasi neto yang tinggi, dengan begitu dapat dikatakan bahwa KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dalam hal pelayanan tergolong sangat baik.

## **7. Penilaian Aspek Jatidiri Koperasi**

Penilaian pada aspek jatidiri koperasi adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan anggota, penilaian jatidiri koperasi didasarkan pada 2 rasio, yaitu: rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota

### **a. Rasio Partisipasi Bruto**

Penilaian rasio partisipasi bruto bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam melayani anggota, partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi bruto, rumus dari rasio ini adalah:

$$\frac{\text{Partispasi Bruto}}{\text{Partispasi bruto + Pendapatan}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan dari rasio partisipasi bruto:

**Tabel 4.36 Hasil Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

Tahun	Partisipas Bruto (Rp)	Partisipasi Bruto + Pendapatan (Rp)	Rasio (%)
2020	1.458.284.251	1.525.708.852	95,58
2021	1.296.815.965	1.380.812.027	93,92
2022	1.215.100.178	1.456.654.900	83,42

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.36 diketahui angka partisipasi bruto dan partisipasi bruto ditambah pendapatan tidak jauh berbeda, dari perbandingan itu diperoleh rasio dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan pada tahun 2020 diperoleh persentasi rasio sebesar 95,58% dan pada tahun 2021 sebesar 93,92% kemudian pada tahun 2022 sebesar 83,42% meskipun mengalami penurunan namun rasio tersebut masih berada pada rentang >75%. Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.37 Penskoran Rasio Partisipasi Bruto**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	95,58%	100	7%	7
2021	93,92%	100	7%	7
2022	83,42%	100	7%	7

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.37 diketahui nilai dari tahun 2020-2022 yaitu 100 dengan skor 7 yang merupakan nilai maksimal pada rasio ini. Hal ini menunjukkan bahwa KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong mampu melayani anggotanya dengan baik.

### b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Penilaian rasio promosi ekonomi anggota adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, rumus dari rasio ini adalah:

$$\frac{PEA}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah hasil perhitungan dari rasio promosi ekonomi anggota:

**Tabel 4.38 Hasil Perhitungan Rasio Prmosi Ekonomi Anggota**

Tahun	PEA (Rp)	Simpanan Pokok + Simpanan Wajib (Rp)	Rasio (%)
2020	473.700.397	9.585.687.500	4,94
2021	403.982.331	10.042.992.009	4,02
2022	291.573.082	9.896.359.000	2,95

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 4.38 diketahui angka PEA sangat kecil dibandingkan simpanan pokok ditambah simpanan wajib, diketahui angka PEA hanya diperoleh dari SHU bagi anggota karena pada KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong tidak melakukan perhitungan laporan promosi ekonomi anggota, sehingga rasio yang diperoleh pada tahun 2020-2022 sebesar 4,94%, 4,02%, 2,95% secara berurutan, dari rasio tersebut berada pada rentang <5%. Kemudian dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.39 Penskoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota**

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2020	4,94%	0	3%	0
2021	4,02%	0	3%	0
2022	2,95%	0	3%	0

**Sumber:** Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.37 diketahui dari rasio pada tahun 2020-2022 memperoleh nilai yang sama yaitu 0 dengan skor 0 yang merupakan nilai terendah pada rasio promosi ekonomi anggota, solusi yang dapat dilakukan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan rasio promosi ekonomi anggota adalah melakukan perhitungan Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan MEPPP dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga penilaian pada rasio promosi ekonomi anggota pada tahun selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Berdasarkan skor penilaian kesehatan yang telah dihitung pada 7 aspek penilaian kesehatan, yang meliputi aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi, maka dapat digunakan untuk mengetahui kriteria kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang meliputi predikat sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Rangkuman dari penilaian skor untuk menetapkan kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.40 Rangkuman Skor Penilaian Kesehatan KPRI Warga

Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022

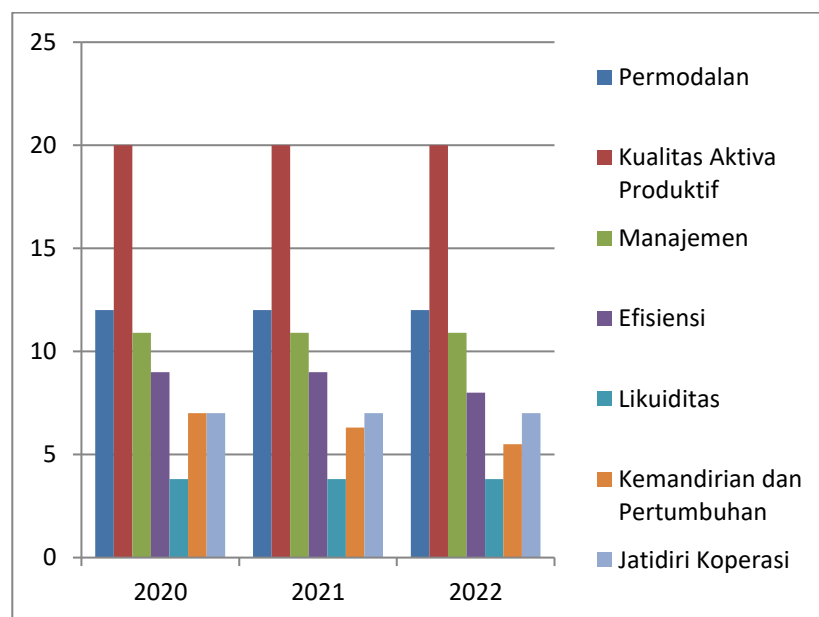
No	Aspek yang Dinilai	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	<b>Permodalan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	3	3	3
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko	6	6	6
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	3	3
2.	<b>Kualitas Aktiva Produktif</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	a. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan	5	5	5
	b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan	5	5	5
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	5	5	5
	d. Rasio Pinjaman Yang Berisiko terhadap Pinjaman Yang Diberikan	5	5	5
3.	<b>Manajemen</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>
	a. Manajemen Umum	2,5	2,5	2,5
	b. Manajemen Kelembagaan	3	3	3
	c. Manajemen Permodalan	1,2	1,2	1,2
	d. Manajemen Aktiva	2,4	2,4	2,4
	e. Manajemen Likuiditas	1,8	1,8	1,8
4.	<b>Efisiensi</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
	a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	4	4	4
	b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	3	3	2
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2	2	2
5.	<b>Likuiditas</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
	a. Rasio Kas	2,5	2,5	2,5
	b. Rasio Pinjaman Yang Diberikan terhadap Dana Yang Diterima	1,3	1,3	1,3
6.	<b>Kemandirian dan Pertumbuhan</b>	<b>7</b>	<b>6,3</b>	<b>5,5</b>
	a. Rentabilitas Aset	0,8	0,8	0,8
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	2,3	1,5	0,8
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	4	4
7.	<b>Jatidiri Koperasi</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
	a. Rasio Partisipasi Bruto	7	7	7
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota	0	0	0
<b>Skor Akhir</b>		<b>69,65</b>	<b>68,90</b>	<b>67,2</b>
<b>Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi</b>		Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat

Sumber: Data diolah, 2023



Berdasarkan tabel 4.40 rangkuman penilaian kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong tahun 2020-2022 diatas menjelaskan bahwa tingkat kesehatan koperasi memiliki predikat “Cukup Sehat”, namun pada setiap tahunnya skor akhir mengalami penurunan tetapi tidak mempengaruhi predikat kesehatan koperasi karena masih berada pada rentang nilai 66-80, kenaikan dan penurunan pada semua aspek penilaian dapat dilihat dari grafik berikut:

**Gambar 4.1 Skor 7 Aspek Penilaian Kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022**



**Sumber:** Data diolah, 2023

Grafik diatas menunjukkan bawah dari ke 7 aspek penilaian kesehatan yang mampu mempertahankan hasil skor dari tahun 2020-2022 ada 5 aspek yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek likuiditas, dan aspek jatidiri koperasi, sedangkan kedua aspek lainnya yaitu: aspek efisiensi, dan

aspek kemandirian dan pertumbuhan pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan hasil skor yang dipengaruhi oleh tidak stabilnya hasil rasio yang ada dari aspek tersebut.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang berisi penilaian kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong tahun 2020-2022 yang meliputi ketujuh aspek penilaian yang meliputi aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan keuangan pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

#### **1. Aspek Permodalan**

Penilaian aspek permodalan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dan penskoran terhadap 3 rasio, diantaranya adalah rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

Hasil perhitungan dan penskoran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022 aspek permodalan diperoleh skor 12 setiap tahunnya, dimana menurut Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor maksimalnya yaitu 15. Artinya skor permodalan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong masih belum maksimal namun tergolong stabil karena selama 3 tahun berturut-turut dapat mempertahankan skornya sehingga jika

dipersentasikan skor tersebut memperoleh angka 80% dan tergolong sehat.

## 2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian aspek kualitas aktiva produktif KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dan penskoran terhadap 4 rasio, diantaranya rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Hasil perhitungan dan penskoran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022 aspek kualitas aktiva produktif diperoleh skor 20 setiap tahunnya, dimana menurut Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor maksimalnya yaitu 20. Artinya skor kualitas aktiva produktif KPRI Warga Depdikbud masih belum maksimal namun tergolong stabil karena selama 3 tahun berturut-turut dapat mempertahankan skornya sehingga jika dipersentasikan skor tersebut memperoleh angka 80% dan tergolong sehat.

## 3. Aspek Manajemen

Penilaian aspek manajemen KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara perhitungan dan penskoran yang bersumber dari hasil wawancara sesuai Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 terhadap 5 komponen yaitu manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas.

Hasil perhitungan dan penskoran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022 aspek manajemen diperoleh skor 10,9 setiap tahunnya, dimana menurut Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor maksimalnya yaitu 15. Artinya skor manajemen KPRI Warga Depdikbud masih belum maksimal namun tergolong stabil karena selama 3 tahun berturut-turut dapat mempertahankan skornya sehingga jika dipersentasikan skor tersebut memperoleh angka 72,62% dan tergolong cukup sehat.

#### 4. Aspek Efisiensi

Penilaian aspek efisiensi KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara perhitungan dan penskoran terhadap 3 rasio diantaranya adalah rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dan rasio efisiensi pelayanan.

Hasil perhitungan dan penskoran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aspek efisiensi pada tahun 2020 dan 2021 memperoleh skor yang sama yaitu 9 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan skor 8, dimana menurut Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor maksimalnya yaitu 10. Artinya skor efisiensi KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong hampir sempurna pada tahun 2020-2021 namun mengalami penurunan ditahun berikutnya, sehingga jika dipersentasikan skor tersebut memperoleh angka 90% pada tahun 2020-2021 tergolong sehat dan memperoleh angka 80% pada tahun 2022 tergolong sehat.

## 5. Aspek Likuiditas

Penilaian aspek likuiditas KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara perhitungan dan penskoran terhadap 2 rasio yaitu rasio kas dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

Hasil perhitungan dan penskoran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aspek likuiditas pada tahun 2020-2022 memperoleh skor sama yaitu 3,8 dari skor maksimal 15 pada Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016. Artinya skor likuiditas KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong sangat rendah dikarenakan terjadinya pengendapan dana, sehingga jika dipersentasikan skor tersebut memperoleh angka 25,33% dan tergolong dalam pengawasan khusus.

## 6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dan penskoran terhadap 3 rasio yaitu rasio rentabilitas aset, rasio rentabilitas modal sendiri dan rasio kemandirian operasional pelayanan.

Hasil perhitungan dan penskoran aspek kemandirian dan pertumbuhan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 memperoleh skor 7, pada tahun 2021 memperoleh skor 6,3 dan pada tahun 2022 memperoleh skor 5,5. Menurut Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 skor maksimal pada aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah 10. Diketahui setiap tahunnya skor kemandirian dan pertumbuhan KPRI Warga Depdikbud

Kabupaten Tabalong mengalami penurunan, sehingga jika dipersentasikan skor tersebut memperoleh angka 70% pada tahun 2020 dengan predikat cukup sehat, 63% pada tahun 2021 dengan predikat cukup sehat dan 55% pada tahun 2022 dengan predikat dalam pengawasan.

#### 7. Aspek Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara perhitungan dan penskoran terhadap 2 rasio yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota.

Hasil perhitungan dan penskoran aspek jatidiri KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2022 memperoleh skor sama yaitu 7 dari skor maksimal 10 menurut Perdep KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016. Sehingga jika dilakukan persentasi pada skor tersebut memperoleh angka 70% dengan predikat cukup sehat.

Berdasarkan pembahasan diatas diketahui pada tahun 2020 diperoleh total skor akhir sebesar 69,65 dengan kategori predikat "Cukup Sehat" dan pada tahun 2021 diperoleh skor akhir sebesar 68,90 dengan kategori predikat "Cukup Sehat" kemudian pada tahun 2022 diperoleh skor akhir sebesar 67,2 dengan kategori predikat "Cukup Sehat". Jadi, perkembangan kesehatan keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong masih belum stabil karena setiap tahunnya ada beberapa aspek penilaian yang mengalami penurunan skor, namun KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong masih bisa mempertahankan kondisi

keuangannya yaitu selama tiga tahun berturut-turut memiliki predikat “Cukup Sehat”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada:

1. Aspek permodalan dengan besarnya modal koperasi yang dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya sehingga berjalan dengan lancar.
2. Aspek kualitas aktiva produktif dengan kemampuan koperasi dalam memberikan pinjaman dengan prinsip kehati-hatian sehingga tidak ada pinjaman yang bermasalah dan pinjaman yang berisiko yang dikeluarkan oleh koperasi.
3. Aspek efisiensi dengan kemampuan koperasi dalam melakukan pengeluaran biaya operasional yang baik dalam mencapai tujuannya.
4. Aspek likuiditas KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong masih belum mampu menyeimbangkan antara kas dan bank dengan kewajiban lancarnya dari tahun ke tahun karena besarnya modal koperasi terhadap kewajiban yang mengakibatkan pengendapan dana yang bersumber dari simpanan anggota.
5. Aspek kemandirian dan pertumbuhan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong masih belum mampu meningkatkan SHU nya dari tahun ke tahun dikarenakan jumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota sempat mengalami penurunan, juga sempat tidak terjadinya rapat anggota tahunan pada tahun 2020 dan 2021 sehingga tidak ada pengeluaran biaya rapat anggota tahunan, kemudian pada tahun 2022 dilakukan rapat anggota tahunan yang menyebabkan keluarnya biaya

rapat sehingga untuk sisa hasil usaha mengalami penurunan setiap tahunnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tingkat kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong selama tahun 2020-2022 dilihat dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi dinyatakan berpredikat cukup sehat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2022 adalah dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan.

#### **B. Saran**

1. KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong
  - a) Diharapkan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dapat meningkatkan predikat kesehatannya pada aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi sehingga memperoleh predikat sehat.
  - b) Aspek likuiditas menjadi aspek dengan bobot skor paling rendah pada penilaian kesehatan keuangan tahun 2020-2022 diharapkan pengurus dan pengelola KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dapat memperbaiki predikat tersebut dengan cara menyeimbangkan antara kas dan bank terhadap kewajiban lancar.

c) Aspek kemandirian dan pertumbuhan mengalami penurunan bobot skor setiap tahunnya diharapkan KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong dapat meningkatkan pendapatan sisa hasil usaha dengan cara memperbanyak pemberian pinjaman dengan anggota sehingga perolehan dari jasa pinjaman anggota dapat meningkatkan sisa hasil usaha.

## 2. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong karena pada penilaian tingkat kesehatan keuangan koperasi tidak ditemukan laporan promosi ekonomi anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anistya, N. Y., Bahri, S., & Wahyudi, U. (2022). Analisis Kesehatan Keuangan Berdasarkan Aspek Likuiditas Pada Koperasi Kredit Karya Jasa Palembang Tahun 2014. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology*, 53-62.
- Endrekson, R. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Pada Primer Koperasi Kartika Dwipangga Karang Endah. *Management Studies & Entrepreneurship Journal*, 88-104.
- Fauzi, Y. A., & Setiawan, E. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Ngudi Lestari Desa Sanan, Girimarto, Wonogiri. *Prima Ekonomika*, 16-30.
- Hayati, L., Rudiana, & Rizqiani, A. H. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi Syariah BMT Al-Karomah Martapura. *Management and Business Strategi*, 48-62.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Hodsay, Z., & Yolanda, Z. (2019). Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 Palembang. *Jurnal PROFIT : Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 144-125.
- Indonesia, P. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Jakarta: Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- (2015). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015*. Jakarta.
- (2016). *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016*. Jakarta.
- (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Purnamawati, I. G. (2018). *Akuntansi Dan Implementasi Dalam Koperasi Dan UMKM*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Purtowo, A. (2007). *Panduan Laboratorium Statistik Inferensial*. Jakarta: Grasindo.
- Sriekaningsih, A., & Daengs, A. (2020). *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Umar, H. (2003). *Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa untuk Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Informasi Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Tabalong



Sumber: Diskopukmperindag Kab. Tabalong 2023

**Lampiran 2. Data Jumlah Koperasi Primer Sekunder dan Anggotanya Sekalimantan Selatan**



Judul	: Jumlah Koperasi Primer Sekunder dan anggotanya
Sumber Data	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan
Per Tanggal	: 24 November 2022

Lokasi/ Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Koperasi
	Primer (2019)	Koperasi Primer (2019)	Sekunder (2019)	Koperasi Sekunder (2019)	Primer (2020)	Koperasi Primer (2020)	Sekunder (2020)
Kab. Tanah Laut	155	29,232	1	10	165	29,992	1
Kab. Kotabaru	191	40,483	-	-	195	40,611	-
Kab. Banjar	248	32,262	1	1	251	31,313	-
Kab. Barito Kuala	121	31,703	2	2	122	31,887	-
Kab. Tapin	143	19,238	3	3	146	20,422	-
Kab. Hulu Sungai Selatan	172	19,921	4	4	163	19,437	-
Kab. Hulu Sungai Tengah	112	25,292	1	10	112	25,171	1
Kab. Hulu Sungai Utara	125	11,314	1	7	126	11,460	1
Kab. Tabalong	100	11,246	-	-	103	11,615	-
Kab. Tanah Bumbu	371	431,179	1	435	377	43,932	1
Kab. Balangan	107	8,933	3	15	107	8,880	3
Kota Banjarmasin	508	76,273	2	58	545	82,480	15
Kota Banjarbaru	179	18,654	1	16	215	20,359	2
<b>Total</b>	<b>2,532</b>	<b>755,730</b>	<b>20</b>	<b>561</b>	<b>2,627</b>	<b>377,559</b>	<b>24</b>



Judul : Jumlah Koperasi Primer Sekunder dan anggotanya  
Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan  
Per Tanggal : 24 November 2022

Lokasi/ Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
	Koperasi Sekunder (2020)	Primer (2021)	Koperasi Primer (2021)	Sekunder (2021)	Koperasi Sekunder (2021)
Kab. Tanah Laut	10	167	29,564	1	10
Kab. Kotabaru	-	201	41,556	-	-
Kab. Banjar	-	253	31,595	-	-
Kab. Barito Kuala	-	121	31,930	-	-
Kab. Tapin	-	146	22,033	-	-
Kab. Hulu Sungai Selatan	-	162	19,402	-	-
Kab. Hulu Sungai Tengah	10	77	25,758	1	10
Kab. Hulu Sungai Utara	7	127	11,599	1	7
Kab. Tabalong	-	102	11,507	-	-
Kab. Tanah Bumbu	435	390	46,145	1	435
Kab. Balangan	15	107	8,664	3	15
Kota Banjarmasin	655	570	83,260	17	680
Kota Banjarbaru	41	203	17,400	2	15
<b>Total</b>	<b>1,173</b>	<b>2,626</b>	<b>380,413</b>	<b>25</b>	<b>1,173</b>

**Lampiran 3. Persentasi Rasio Penilaian Kesehatan Keuangan KPRI  
Warga Depdikbud Tahun 2020-2022**

No	Aspek yang Dinilai	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	<b>Permodalan</b>			
	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	68,04%	67,54%	66,11%
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko	∞	∞	∞
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	115,80%	112,99%	116,86%
2.	<b>Kualitas Aktiva Produktif</b>			
	a. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan	49,84%	37,96%	41,45%
	b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan	0%	0%	0%
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	∞	∞	∞
	d. Rasio Pinjaman Yang Berisiko terhadap Pinjaman Yang Diberikan	0%	0%	0%
3.	<b>Manajemen</b>			
	a. Manajemen Umum	2,5%	2,5%	2,5%
	b. Manajemen Kelembagaan	3%	3%	3%
	c. Manajemen Permodalan	1,2%	1,2%	1,2%
	d. Manajemen Aktiva	2,4%	2,4%	2,4%
	e. Manajemen Likuiditas	1,8%	1,8%	1,8%
4.	<b>Efisiensi</b>			
	a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	1,08%	0,70%	1,03%
	b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	50,75%	53,67%	62,39%
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2,21%	2,03%	2,12%
5.	<b>Likuiditas</b>			
	a. Rasio Kas	248,64%	262,24%	257,29%
	b. Rasio Pinjaman Yang Diberikan terhadap Dana Yang Diterima	58,03%	58,91%	55,82%
6.	<b>Kemandirian dan Pertumbuhan</b>			
	a. Rentabilitas Aset	4,30%	3,65%	2,64%
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	4,19%	3,44%	2,53%
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	188,25%	174,92%	157,13%
7.	<b>Jatidiri Koperasi</b>			
	a. Rasio Partisipasi Bruto	95,58%	93,92%	83,42%
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota	4,94%	4,02%	2,95%

**Sumber:** Data diolah, 2023



Lampiran 4. Neraca KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022

WARGA DEPENDIKBUD KABUPATEN TABALONG  
 HEARUA  
 Per 31 Desember 2021

AKTIVA	31-Des-20	31-Des-21	PASIVA	31-Des-20	31-Des-21
I. Harta Sangat Lancar			IV. Hutang Lancar		
111700. Kas	1.912.112.296,35	2.500.886.642,00	231100. Simpanan In Gub	986.990.149,00	1.129.969.285,00
111740. Kas Unit	1.574.785.321,58	773.780.052,00	231101. Simpanan Wajib Tabung (SWT)	249.409.807,60	280.271.400,00
112110. Bank BRI	251.185.305,00	170.341.536,00	219500. Dana - Dana	399.113.428,85	344.328.806,00
112111. Bank Pembangunan Kalsel	1.416.070.916,00	1.806.277.464,00	215100. Simpanan Berjangka Anggota	437.459.071,82	247.500.000,00
112112. BKE Cabang BJM ( Takop )	351.653.186,00	356.457.288,00	Jumlah Hutang Lancar	<b>2.072.972.467,27</b>	<b>2.002.069.485,00</b>
112170. Deposito BRI	100.000.000,00	100.000.000,00			
112180. Sertifikat Khusus Pengembangan Bank (SKPB)	38.000.000,00	38.000.000,00			
Jumlah Harta sangat Lancar	<b>5.643.807.004,93</b>	<b>5.744.682.982,00</b>	231102. Simp. Lain-lain ( Jese Simpanan & Usaha)	3.231.737.618,27	3.649.963.702,20
112431. Pijaman Yang diberikan pada Anggota	9.210.269.689,25	9.891.131.029,00	Jumlah Hutang Jgk Panjang	<b>3.231.737.618,27</b>	<b>3.649.963.702,20</b>
219520. Akumulasi Penyusutan piutang	(5.670.596,80)	(5.670.596,80)			
114.140. Persediaan Tanah	1.314.822.825,48	1.387.500.000,00			
Jumlah Harta Lancar	<b>10.519.411.927,93</b>	<b>11.272.960.442,20</b>			
II. Investasi Jangka Panjang			231200. Simpanan Pokok	187.160.000,00	187.050.000,00
115500. Simpanan Pada GKPRI Kalsel	129.363.779,88	129.928.325,00	231300. Simpanan Wajib	9.398.527.500,00	9.856.942.009,00
115600. Investasi Pada Unit Elektronik	44.221.553,00	44.221.553,00	231400. Cadangan	892.899.204,20	966.415.566,00
115700. Investasi Pada Unit Kendaraan	32.419.071,00	8.919.071,00	219820. cadangan Resiko	78.486.541,00	119.950.848,00
115800. Investasi Pada Unit Toko	83.201.526,00	75.601.526,00	241300. Laba Usaha ( SHU )	728.769.842,00	621.511.279,00
Jumlah Investasi	<b>289.205.929,88</b>	<b>258.670.475,00</b>	241200. laba Tahun Berjalan	8.500.000,00	8.500.000,00
III. Harta Tetap			232200. Hibah		
121910. Tanah Kantor	79.000.000,00	79.000.000,00			
121500. Gedung Kantor	188.686.000,00	188.686.000,00			
121800. Akumulasi penyusutan Gedung	(132.080.200,00)	(141.514.500,00)			
121700. Inventaris Kantor	111.887.500,00	116.217.500,00			
121800. Akumulasi Penyusutan Inventaris	(100.866.000,00)	(107.260.000,00)			
Jumlah Harta tetap	<b>146.827.300,00</b>	<b>134.129.000,00</b>	Jumlah Kekayaan Bersih	11.294.342.087,20	11.758.369.702,20
Total Aktiva	<b>16.599.052.162,74</b>	<b>17.410.422.889,20</b>	Total Pasiva	<b>16.599.052.162,74</b>	<b>17.410.422.889,20</b>

Pengurus  
 1. H. Suaidi Rakhman, S.Pd ( Ketua )  
 2. H. Kurnain, S.Pd ( Wakil Ketua )  
 3. H. Mahyudin, S.Pd, MM ( Sekretaris )  
 4. Mujierudin, S.Pd, MAP ( Bendahara )  
 5. Hj. Nor Aminah, S.Pd ( Wakil Bendahara )

Badan Pengawas  
 1. H. Syaekani, S.Pd ( Koordinator )  
 2. Ida Ningsih, S.Pd, Msi ( Anggota )  
 3. Suhaipi, S.Pd, MM ( Anggota )

KOPERASI PELOAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KPRI RI)  
**WARGA DEPKIBUD KABUPATEN TABALONG**  
**NEARACA**  
 Per 31 Desember 2022



	31-Des-21	31-Des-22	PASIVA	31-Des-21	31-Des-22
<b>AKTIVA</b>			<b>PASIVA</b>		
I. Harta Sangat Lancar	2.500.866.642,00	3.985.038.696,00	IV. Hutang Lancar		
111700. Kas	773.760.092,00	617.523.830,00	213001. Simpanan In Gub	1.129.969.289,00	1.234.539.313,00
112110. Bank BRI	170.341.536,00	244.349.129,00	213002. Simpanan Wajib Tabung ( SWT )	280.271.400,00	281.109.207,00
112111. Bank Pembangunan Kalsel	1.805.217.464,00	1.190.623.676,00	213005. Simpanan Wisata		262.737.203,00
112112. BKE Cabang BJM ( Takop )	356.457.288,00		219600. Dana - Dana	344.328.806,00	356.092.592,00
112170. Deposito BRI	100.000.000,00	100.000.000,00	215100. Simpanan Berjangka Anggota	247.500.000,00	212.500.000,00
112180. Sertifikat Khusus Pengembangan Bank (SKPB)	38.000.000,00	38.000.000,00	Jumlah Hutang Lancar	<b>2.002.069.495,00</b>	<b>2.346.978.315,00</b>
Jumlah Harta sangat Lancar	5.744.662.982,00	6.176.535.331,00			
112431. Pinjaman Yang diberikan pada Anggota	9.891.131.029,00	9.496.795.297,00			
219520. Akumulasi Penyusutan piutang	(5.670.586.90)	(5.670.586,00)	213003. Simp. Lain-lain ( Jasa Simpan & Usaha)	3.649.983.702,20	3.571.679.033,00
114.140. Persediaan Tanah	1.387.500.000,00	1.394.300.000,00	Jumlah Hutang Jgk Panjang	<b>3.649.983.702,20</b>	<b>3.571.679.033,00</b>
Jumlah Harta Lancar	<b>11.272.960.442,20</b>	<b>10.885.424.711,00</b>			
II. Investasi Jangka Panjang			231200. Simpanan Pokok	187.050.000,00	184.500.000,00
115500. Simpanan Pada GPKRI Kalsel	129.928.325,00	130.704.600,00	231300. Simpanan Wajib	9.855.942.009,00	9.711.859.000,00
115600. Investasi Pada Unit Elektronik	44.221.553,00	44.221.553,00	231400. Cadangan	965.415.566,00	1.025.679.344,00
115700. Investasi Pada Unit Kendaraan	8.919.071,00		219620. cadangan Resiko	119.950.848,00	164.984.954,00
115800. Investasi Pada Unit Toko	75.601.526,00	86.508.444,00	241300. Laba Usaha Tahun lalu	621.511.279,00	
Jumlah Investasi	<b>268.670.475,00</b>	<b>261.434.597,00</b>	241200. Laba Usaha Tahun Berjalan		448.573.973,00
III. Harta Tetap			232200. Hibah	8.500.000,00	8.500.000,00
121910. Tanah Kantor	79.000.000,00	79.000.000,00			
121500. Gedung Kantor	188.686.000,00	188.686.000,00			
121600. Akumulasi penyusutan Gedung	(141.514.500,00)	(150.948.800,00)			
121700. Inventaris Kantor	115.217.500,00	65.688.000,00			
121800. Akumulasi Penyusutan Inventaris	(107.260.000,00)	(63.265.220,00)			
Jumlah Harta tetap	134.129.000,00	138.399.880,00	Jumlah Kekayaan Bersih	<b>11.758.369.702,00</b>	<b>11.544.087.271,00</b>
<b>Total Aktiva</b>	<b>17.410.422.899,20</b>	<b>17.462.754.619,00</b>	<b>Total Pasiva</b>	<b>17.410.422.899,20</b>	<b>17.462.754.619,00</b>

Pengawas  
 1. H. SAUKANI, S.PD  
 ( Anggota )

2. H. NOOR EFFANSYAH, S.PD  
 ( Koordinator )

3. H. MAHYUDIN, S.PD, MM  
 ( Anggota )

Pengurus  
 1. MUJERIARUDIN, S.PD, MAP  
 ( Ketua )

2. H. BASRAH, S.Pd  
 ( Wakil Ketua )

3. H. KURNAIN, S.Pd, SD  
 ( Sekretaris )

4. SYAMSUDIN, S.Pd  
 ( Bendahara )

5. Hj. HERLIANA, S.Pd  
 ( Wakil Bendahara )

**Lampiran 5. Perhitungan Hasil Usaha KPRI Warga Depdikbud Kabupaten  
Tabalong Tahun 2020-2022**

REALISASI  
ANGGARAN DAN PENDAPATAN / SELISIH HASIL USAHA

Mata Anggaran		Realisasi 2020	Realisasi 2021
<b>A. PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
411110	Pendapatan Jasa Pinjaman	1.406.499.691	1.263.734.700
412111	Pendapatan Provisi	51.784.560	33.081.265
	<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>	<b>1.458.284.251</b>	<b>1.296.815.965</b>
<b>B. BIAYA OPERASIONAL</b>			
511130	Biaya Jasa Tabungan berjangka	15.800.000	9.050.000
512110	Biaya Gaji Karyawan 5 Orang	91.200.000	91.200.000
512160	Biaya Kehormatan Pengurus 5 Orang	18.437.500	18.437.500
512170	Biaya Honor Pengurus Unit 18 orang	37.887.500	37.887.500
512130	Biaya Penagihan di Dinas	50.000.000	47.000.000
512180	Biaya pemeriksaan ( Pengawas 3 orang )	6.000.000	6.000.000
512500	Biaya Perjalanan	1.000.000	150.000
512600	Biaya Listrik	2.010.000	2.050.697
512700	Biaya Telepon	4.500.000	4.647.600
512710	Biaya Air PDAM	1.120.310	1.150.094
512900	Biaya Ekspedisi	325.000	316.600
512800	Biaya Rapat Pengurus		
512810	Biaya RAT		
512910	Biaya Paket Lebaran Anggota	468.742.000	464.057.000
512940	Biaya ATK	6.738.500	1.358.250
514800	Biaya ops lain	6.276.656	3.378.250
515100	Biaya Penyusutan Inventaris	6.593.800	6.394.000
515300	Biaya Penyusutan Gedung Kantor	9.434.300	9.434.300
	<b>Jumlah Biaya Operasional</b>	<b>726.065.566</b>	<b>702.511.791</b>
	<b>Laba Operasional ( A - B )</b>	<b>732.218.685</b>	<b>594.304.174</b>
<b>C. PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>			
425000	Pendapatan Jasa Rekening Bank	18.722.722	16.968.770
425100	Pendapatan Jasa Deposito BRI	3.047.158	2.309.746
425200	Pendapatan lain-lain ( fee GKP )	1.835.471	564.546
425300	Pendapatan Unit Toko	7.600.000	7.500.000
425310	Pendapatan/Fee Penyaluran Barang	8.219.250	16.653.000
425400	Pendapatan Sewa Kendaraan	28.000.000	40.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan Non Operasional</b>	<b>67.424.601</b>	<b>83.996.062</b>
<b>D. BIAYA NON OPERASIONAL</b>			
515200	Biaya Peny. Kendaraan/operasional	44.500.000	42.750.000
529290	Beban Bunga dan Provisi Pada Pihak Lain	1.375.644	
529300	Biaya Operasional Kavling Tanah	10.100.000	
	<b>Jumlah Biaya Non Operasional</b>	<b>55.975.644</b>	<b>42.750.000</b>
	<b>Laba Non Operasional</b>	<b>11.448.957</b>	<b>41.246.062</b>
529100	Biaya Pajak ( PPh 25 )	14.897.800	14.038.957
<b>E. SISA HASIL USAHA ( SHU ) A - B + C - D</b>		<b>728.760.842</b>	<b>621.511.279</b>

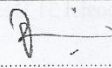
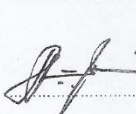
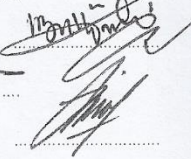
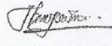

Pengurus

- H. M. SUAIDI RAKHMAN, S.Pd  
( Ketua )
- H. Kumain, S.Pd.  
( Wakil Ketua )
- H. Mahyudin, S.Pd, MM  
( Sekretaris )
- Mujeriarudin, S.Pd, MAP  
( Bendahara )
- Hj. Nor Aminah, S.Pd

REALISASI  
ANGGARAN DAN PENDAPATAN / SELISIH HASIL USAHA

Mata Anggaran		Realisasi 2021	Realisasi 2022
<b>A. PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
411110	Pendapatan Jasa Pinjaman	1.263.734.700	1.158.277.598
412111	Pendapatan Provisi	33.081.265	56.822.580
	<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>	<b>1.296.815.965</b>	<b>1.215.100.178</b>
<b>B. BIAYA OPERASIONAL</b>			
511130	Biaya Jasa Tabungan berjangka	9.050.000	12.575.000
512110	Biaya Gaji Karyawan Orang	91.200.000	91.200.000
512160	Biaya Kehormatan Pengurus 5 Orang	18.437.500	18.437.500
512170	Biaya Honor Ketua Unit 18 orang	37.887.500	37.627.500
512130	Biaya Penagihan di Dinas	47.000.000	48.250.000
512180	Biaya pemeriksaan ( Pengawas 3 orang )	6.000.000	6.000.000
512500	Biaya Perjalanan	150.000	1.700.000
512600	Biaya Listrik	2.050.897	1.940.567
512700	Biaya Telepon	4.647.600	5.104.200
512710	Biaya Air PDAM	1.150.094	586.520
512900	Biaya Ekspedisi	316.600	159.730
512800	Biaya Rapat Pengurus		1.775.000
512810	Biaya RAT		87.870.000
512910	Biaya Paket Lebaran Anggota	464.057.000	432.335.000
512940	Biaya ATK	1.358.250	7.170.700
514800	Biaya ops lain	3.378.250	6.061.540
515100	Biaya Penyusutan Inventaris	6.394.000	9.648.720
515300	Biaya Penyusutan Gedung Kantor	9.434.300	9.434.300
	<b>Jumlah Biaya Operasional</b>	<b>702.511.791</b>	<b>777.876.277</b>
	<b>Laba Operasional ( A - B )</b>	<b>594.304.174</b>	<b>437.223.901</b>
<b>C. PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>			
425000	Pendapatan Jasa Rekening Bank	16.968.770	6.729.929
425100	Pendapatan Jasa Deposito BRI	2.309.746	1.705.850
425200	Pendapatan lain-lain ( fee GKP )	584.546	776.275
425300	Pendapatan Unit Toko	7.500.000	10.906.918
425310	Pendapatan/Fee Penyaluran Barang	16.653.000	4.036.500
425400	Pendapatan Sewa Kendaraan	40.000.000	-
	<b>Jumlah Pendapatan Non Operasional</b>	<b>83.996.062</b>	<b>24.155.472</b>
<b>D. BIAYA NON OPERASIONAL</b>			
515200	Biaya Peny. Kendaraan/operasional	42.750.000	-
529290	Beban Bunga dan Provisi Pada Pihak Lain		-
529300	Biaya Operasional Kavling Tanah		-
	<b>Jumlah Biaya Non Operasional</b>	<b>42.750.000</b>	<b>-</b>
	<b>Laba Non Operasional</b>	<b>41.246.062</b>	<b>24.155.472</b>
529100	Biaya Pajak ( PPh 25 )	14.038.957	12.845.400
<b>E. SISA HASIL USAHA ( SHU ) A - B + C - D</b>		<b>621.511.279</b>	<b>448.572.973</b>

Pengurus  
 1. MUJERARUDIN, S.PD. MAP  
 ( Ketua )  
 2. H. BASRAH, S.Pd.  
 ( Wakil Ketua )  
 3. H.KURNAIN, S.Pd.SD  
 ( Sekretaris )  
 4. SYAMSUDIN, S.Pd  
 ( Bendahara )  
 5. Hj. HERLIANA, S.Pd  
 ( Wakil Bendahara )

**Lampiran 6. Pembagian Sisa Hasil Usaha KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022**

KPRI Warga Depdikbud Kab. Tabalong		
Sisa Hasil Usaha Tahun 2020		
Prosen	Uraian	Rincian
30%	Jasa simpanan anggota	218.630.953
35%	Jasa usaha anggota	255.069.445
10%	Cadangan	72.876.984
7,5%	Dana kesejahteraan pengurus	54.657.738
7,5%	Dana kesejahteraan karyawan	54.657.738
5%	Dana sosial	36.438.492
2,5%	Dana pendidikan	18.219.246
2,5%	Dana pembangunan daerah kerja	18.219.246
<b>Total</b>		<b>728.769.842</b>

28. Sisa Hasil Usaha Rp. 621.511.279,- per 31 Desember 2021 dan Rp. 728.769.842 per 31 Desember 2020. SHU 2021 yang akan dibagi pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Prosen	Uraian	Rincian
30	Jasa simpanan anggota	186.453.383.70
35	Jasa usaha anggota	217.528.947.65
10	Cadangan	62.151.127.90
7,5	Dana Kesejahteraan Pengurus	46.613.345.93
7,5	Dana Kesejahteraan Karyawan	46.613.345.93
5	Dana Sosial	31.075.563.95
2,5	Dana Pendidikan	15.537.781.98
2,5	Dana Pembangunan Daerah Kerja	15.537.781.98
Total		621.511.279,00

28. Sisa Hasil Usaha Rp. 448.573.973,- per 31 Desember 2022 dan Rp. 621.511.279 per 31 Desember 2021. SHU 2022 yang akan dibagi pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Prosen	Uraian	Rincian
30	Jasa simpanan anggota	134.572.192
35	Jasa usaha anggota	157.000.891
10	Cadangan	44.857.397
7,5	Dana Kesejahteraan Pengurus	33.643.048
7,5	Dana Kesejahteraan Karyawan	33.643.048
5	Dana Sosial	22.428.699
2,5	Dana Pendidikan	11.214.349
2,5	Dana Pembangunan Daerah Kerja	11.214.349
Total		448.573.973

**Lampiran 7. Perhitungan Modal Sendiri Tertimbang & Perhitungan ATMR  
KPRI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022**

<b>Perhitungan Modal Sendiri Tertimbang USP KPRI Warga Depdikbud Tahun 2020</b>				
No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal Tertimbang
1	EKUITAS :			
	1. Modal anggota :			
	a. Simpanan pokok	187.160.000	100	187.160.000
	b. Simpanan wajib	9.398.527.500	100	9.398.527.500
	2. Hibab	8.500.000	100	8.500.000
	3. Cadangan umum	892.899.204	100	892.899.204
	4. Cadangan tujuan risiko	78.485.541	50	39.242.771
	5. SHU	728.769.842	50	364.384.921
<b>Jumlah Modal Terimbang</b>				<b>10.890.714.396</b>

**Komponen Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko USP KPRI Warga Depdikbud Tahun 2020**

No	Komponen Aset	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan	ATMR
			Risiko (%)	
1	Kas/Bank	5.154.153.838	0	-
2	Tabungan dan simpanan berjangka	489.653.166	20	97.930.633
3	Pinjaman yg diberikan pd anggota	9.210.259.689	100	9.210.259.689
4	Pinjaman yg diberikan pd calon anggota	-	100	-
5	PPAP	(5.670.586)	100	(5.670.586)
6	Uang Muka Pajak	-	50	-
7	Penyertaan pada koperasi anggota dan pihak lain	-	100	-
8	Aset tetap	146.627.300	70	102.639.110
<b>Jumlah ATMR</b>				<b>9.405.158.846</b>

Perhitungan Modal Sendiri Tertimbang USP KPRI Warga Depdikbud Tahun 2021				
No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal Tertimbang
1	EKUITAS :			
	1. Modal anggota :			
	a. Simpanan pokok	187.050.000	100	187.050.000
	b. Simpanan wajib	9.855.942.009	100	9.855.942.009
	2. Hibab	8.500.000	100	8.500.000
	3. Cadangan umum	965.415.566	100	965.415.566
	4. Cadangan tujuan risiko	119.950.848	50	59.975.424
	5. SHU	621.511.279	50	310.755.640
<b>Jumlah Modal Terimbang</b>				<b>11.387.638.639</b>

Komponen Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko USP KPRI Warga Depdikbud Tahun 2021				
No	Komponen Aset	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan	ATMR
			Risiko (%)	
1	Kas/Bank	5.250.205.694	0	-
2	Tabungan dan simpanan berjangka	494.457.288	20	98.891.458
3	Pinjaman yg diberikan pd anggota	9.891.131.029	100	9.891.131.029
4	Pinjaman yg diberikan pd calon anggota	-	100	-
5	PPAP	(5.670.586)	100	(5.670.586)
6	Uang Muka Pajak	-	50	-
7	Penyertaan pada koperasi anggota dan pihak lain	-	100	-
8	Aset tetap	134.129.000	70	93.890.300
<b>Jumlah ATMR</b>				<b>10.078.242.201</b>

<b>Pehitungan Modal Sendiri Tertimbang USP KPRI Warga Depdikbud Tahun 2022</b>				
No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal Tertimbang
1	EKUITAS :			
	1. Modal anggota :			
	a. Simpanan pokok	184.500.000	100	184.500.000
	b. Simpanan wajib	9.711.859.000	100	9.711.859.000
	2. Hibab	8.500.000	100	8.500.000
	3. Cadangan umum	1.025.879.344	100	1.025.879.344
	4. Cadangan tujuan risiko	164.984.954	50	82.492.477
	5. SHU	448.673.973	50	224.336.987
<b>Jumlah Modal Terimbang</b>				<b>11.237.567.808</b>

**Komponen Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko USP KPRI Warga Depdikbud Tahun 2022**

No	Komponen Aset	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	ATMR
1	Kas/Bank	6.038.535.331	0	-
2	Tabungan dan simpanan berjangka	138.000.000	20	27.600.000
3	Pinjaman yg diberikan pd anggota	9.496.795.297	100	9.496.795.297
4	Pinjaman yg diberikan pd calon anggota	-	100	-
5	PPAP	(5.670.586)	100	(5.670.586)
6	Uang Muka Pajak		50	-
7	Penyertaan pada koperasi anggota dan pihak lain	-	100	-
8	Aset tetap	139.359.980	70	97.551.986
<b>Jumlah ATMR</b>				<b>9.616.276.697</b>



**Lampiran 8. Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen KPRI Warga  
Depdikbud Kabupaten Tabalong**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 06 /PER/DEP.6/IV/2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN  
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT  
SIMPAN PINJAM KOPERASI

**DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN**

No.	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya / Tidak
<b>1</b>	<b>MANAJEMEN UMUM</b>		
1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	Ya
1.2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	tidak
1.3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	Ya
1.4	Adakah Kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	tidak
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja	5	Ya

	diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)		
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	6	Ya
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	7	Ya
1.8	KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	Ya
1.9	Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)	9	Ya
1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	Ya
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal	11	Ya

	yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)		
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	12	Ya
<b>2</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan <i>job description</i> )	13	Ya
2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang <i>job specification</i> )	14	Ya
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15	Ya
2.4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP ) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi)	16	Ya
2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP	17	Ya

	Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)		
2.6	KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	18	Ya
<b>3</b>	<b>PERMODALAN</b>		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	19	Tidak
3.2	kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	20	tidak
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	Ya
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	22	tidak
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	Ya

4	AKTIVA		
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	24	Ya
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)	25	Ya
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	26	Ya
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang- kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	26	27
4.5	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP- nya termasuk BMPP)	28	Ya
4.6	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP- nya termasuk BMPP)	29	28
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati- hatian (dibuktikan dengan hasil	30	Ya

	analisis kelayakan pinjaman)		
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31	Ya
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	tidak
4.10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	33	tidak
<b>5</b>	<b>LIKUIDITAS</b>		
5.1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	Ya
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	35	tidak
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	36	tidak
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi	37	Ya

5.5	(dibuktikan dengan kebijakan tertulis) Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	38	ya.
-----	--	----	-----

**Deputi Bidang Pengawasan**

Cap  
&  
Ttd

**Ir. Meliadi Sembiring, M.Sc.**  
NIP. 19590313 198303 1 001

**Lampiran 9. Data Hasil Perhitungan Penilaian  
Kesehatan Keuangan KPRI Warga Depdikbud  
Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2022**